

ENEWSLETTER

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF

Edisi Februari | Tahun 2023 No. 45

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



**Habib
Aboe Bakar
Alhabsyi**

Proporsional Terbuka

*Jalan Tengah
Kedaulatan Rakyat
dan Peran Parpol*



Kolaborasi Melayani Indonesia

Setiap elemen bangsa harus memiliki rasa cinta tanah air dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan NKRI serta mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Mungkin sebagian kita merasa sudah melakukan banyak hal untuk Indonesia. Tapi seyogiya kita merasa masih jauh lebih banyak yang harus kita perjuangkan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang kita cintai bersama.

Tanggung jawab kita jauh lebih besar dari waktu yang kita punya. Menjadi Indonesia adalah proses yang tak bekesudahan, being Indonesia is never ending process. Mengutip Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia ke-2, bangsa dan negara Indonesia masih terus berproses untuk mewujudkan

cita-cita kemerdekaan Indonesia “...yang merdeka, besatu, berdaulat, adil dan makmur.”

Kita semua harus memiliki semangat dan komitmen untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia kita, serta mengokohkan perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih bermartabat, Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan sejahtera sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar kita tersebut. Dalam konteks perjuangan dan tanggung jawab tersebut, ada satu tema yang penting kita angkat bersama, yaitu “Kolaborasi Melayani Indonesia”.

Melalui tema ini kita ingin mengajak seluruh komponen bangsa, khususnya para pejabat publik dan elit politik, untuk mengokohkan jati diri

dan karakter pelayanan kepada rakyat. Tema ini sekaligus menjadi syiar bahwa pelayanan harus menjadi bahasa kepemimpinan negeri ini, dimana para pemimpin, pejabat publik, aparatur negara itu sesungguhnya dan sejatinya adalah “pelayan rakyat.” Nabi SAW bersabda: “Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka” (HR. Abu Na’im).

“Melayani Indonesia” harus menjadi garis perjuangan dan pengabdian bersama di pentas politik dalam level apapun. Bukanlah disebut perjuangan dan pengabdian jika apa yang kita lakukan justru melukai Indonesia, menjatuhkan Indonesia, apalagi sampai menghancurkan Indonesia.

Dengan tema ini pula kita menyadari bahwa untuk melayani Indonesia dibutuhkan kolektivitas atau kebersamaan kita sebagai bangsa.

Kolektivitas yang mendasari kita untuk bersatu, bekerja sama, dan bergotong royong di antara sesama anak bangsa—apapun suku bangsa, agama, daerah dan golongan kita sepanjang gen kita adalah gen Indonesia kita wajib menjaga dan memajukan Indonesia.

“Melayani Indonesia” harus menjadi garis perjuangan dan pengabdian bersama di pentas politik dalam level apapun. Bukanlah disebut perjuangan dan pengabdian jika apa yang kita lakukan justru melukai Indonesia, menjatuhkan Indonesia, apalagi sampai menghancurkan Indonesia.

MENGAPA **PKS** MENDUKUNG SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA



Legal-Formal

bentuk ketaatan kepada
Putusan MK tertanggal
23 Desember 2008.



Kelebihan

- Menciptakan iklim yang adil dan setara bagi setiap kandidat calon legislatif untuk berkontestasi dalam meraih dukungan masyarakat.
- Suara pemilih langsung kepada kandidat
- Terbangun kedekatan antara pemilih dengan kandidat
- Partisipasi dan kendali masyarakat meningkat sehingga mendorong peningkatan kinerja partai dan parlemen



Persiapan pemilu sudah berjalan, lalu kerangka kerja dari seluruh partai politik juga berdasar pada proporsional terbuka.

Apabila gugatan diterima MK dan pasal ini (proporsional terbuka) batalan, maka akan mengubah konstelasi politik yang ada.

Dr. H. Mardani, M.Eng.
Anggota Komisi II FPKS DPR RI



Sekjen PKS: Proporsional Terbuka Jalan Tengah Kedaulatan Rakyat dan Peran Parpol

Jakarta (17/01) — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al Habsyi menilai sistem Pemilu proporsional terbuka sebagai jalan tengah antara kedaulatan rakyat dan peran partai politik.

Pernyataan Aboe ini disampaikan untuk menyikapi adanya Judicial review atau uji materi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka tengah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ketika dulu model perwakilan politik (political representation) diperkenalkan, para pemikir politik dan ketatanegaraan memperingatkan

resiko menggunakan jenis perwakilan ini yang dapat menyebabkan terciptanya government by amateurs yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh sekelompok orang yang tidak memiliki keahlian dan tidak memahami tugas dan fungsinya," tutur Aboe dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/1/2023).

Aboe menjelaskan peran partai politik membuat wakil rakyat bekerja dengan

terstruktur dan sistematis, memiliki agenda politik kenegaraan yang dikaji secara mendalam.

"Untuk mengatasi akibat buruk ini didirikanlah partai politik sebagai salah satu solusinya. Dengan keberadaan partai politik, wakil-wakil rakyat yang dipilih berdasarkan popularitas tersebut dilengkapi dengan agenda-agenda politik kenegaraan," terang Aboe.

Aboe menilai untuk meloloskan gagasan partai untuk kebijakan negara, perlu adanya sinergi antara wakil rakyat dan partai politik, tanpa dukungan partai politik wakil rakyat tidak memiliki gagasan yang kuat di parlemen

"Keduanya harus berlangsung sinergis, tanpa partai politik para wakil rakyat terlihat seperti macan ompong. Memiliki dukungan pemilih tapi tidak memiliki gagasan kuat dan mengakar. Namun partai juga tidak mungkin tanpa suara signifikan untuk terus berpengaruh kuat dalam pembentukan kebijakan. Karenanya, ketokohan dan popularitas para caleg nya menjadi bagian penting bagi lolosnya gagasan-gagasan partai untuk menjadi kebijakan negara," kata dia.

Lebih jauh, Aboe menilai sistem proporsional terbuka tidak boleh dibiarkan tanpa adanya politik gagasan, kekurangan yang ada dalam sistem proporsional terbuka

harus diperbaiki tanpa harus mundur ke belakang menjadi proporsional tertutup.

"Proporsional terbuka tidak boleh dibiarkan berarti politik tanpa gagasan. Melalui dukungan partai politik yang terstruktur para wakil yang memiliki ketokohan dan akseptabilitas yang tinggi

tersebut akan menyuarakan gagasan-gagasan yang didukung argumentasi yang kuat dan aspiratif," jelas Aboe.

"Penggunaan system proporsional terbuka yang saat ini digunakan harus terus diperbaiki tanpa harus Kembali ke system proporsional tertutup," tutup Aboe.



"Proporsional terbuka tidak boleh dibiarkan berarti politik tanpa gagasan. Melalui dukungan partai politik yang terstruktur para wakil yang memiliki ketokohan dan akseptabilitas yang tinggi tersebut akan menyuarakan gagasan-gagasan yang didukung argumentasi yang kuat dan aspiratif,"

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Sekjen DPP PKS

Fraksi PKS Lakukan Diplomasi Kebudayaan Indonesia Sebagai Warisan Dunia ke UNESCO PBB

Paris (19/01) — Fraksi PKS DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO PBB) di Paris, Perancis (Rabu, 18/1/2023).

Delegasi Fraksi PKS dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri bersama Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dan Wakil Ketua Fraksi Sukamta.

Dalam pertemuan dengan pejabat UNESCO, Delegasi Fraksi PKS didampingi oleh Duta Besar RI Untuk Perancis yang sekaligus Wakil Tetap RI untuk UNESCO Mohammad Oemar dan Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO Prof. Ismunandar. Sementara Pejabat UNESCO yang menerima Fraksi PKS adalah Ms. Elfithri Rahmah selaku Chief of Section Capacity Development and Water Family Coordination UNESCO, didamp-

ingi jajaran Program Specialist UNESCO Jorge Ellis De Luca, Alexander Otte, dan Natasya.

Kunjungan kerja Fraksi PKS ke UNESCO ini, menurut Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, adalah dalam rangka diplomasi kebudayaan Indonesia untuk mendorong agar budaya bangsa Indonesia yang sangat kaya dan beragam dapat diakui menjadi warisan dunia (world heritage) terutama atas sejumlah warisan budaya yang saat ini tengah diusulkan ke UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) dunia seperti Reog, Tenun, Tempe dan Jamu.

Sementara itu, Ketua

Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Aljufri dalam sambutannya mengatakan bahwa kunjungan kerja Fraksi PKS ini bagian dari upaya PKS untuk menjalin persahabatan dan kerjasama yang lebih erat dengan mitra internasional, baik mitra negara maupun organisasi internasional. Tujuannya untuk membawa agenda dan kepentingan Indonesia di forum internasional serta dalam rangka ikut serta melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana amanat konstitusi kami, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menteri Sosial RI 2009-2014 ini mengatakan Indonesia adalah negara besar dalam beragam aspeknya. Dan yang paling disyukuri, negara sebesar dan se-beragam Indonesia ini hidup dalam persatuan dan kesatuan. “Hal ini tentu menjadi pelajaran bagi kita bersama dan bangsa-bangsa dunia



“Kami ucapkan terima kasih kepada UNESCO yang telah mengakui sejumlah situs dan budaya Indonesia sebagai Warisan Dunia atau World Heritage. Ke depan, kami berharap UNESCO bisa semakin aktif menginkripsi dan meluluskan proposal Indonesia terkait warisan dunia lainnya,”

Dr. SALIM

Ketua Majelis Syura PKS

bagaimana Indonesia dapat mengelola keberagaman dalam harmoni dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara

dan konsensus kebangsaan,” ungkapnya.

Selengkapnya kunjungi fraksidr.pks.id



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kreatif, Atraktif, Substantif

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



Terkait Pembakaran
Al-Qur'an di Swedia,

Wakil Ketua Komisi I FPKS Minta Menlu RI Protes dan Panggil Dubes di Indonesia

Jakarta (22/01) — Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari mengutuk keras Pemimpin partai sayap kanan Denmark Stram Kurs bernama Rasmus Paludan yang melakukan pembakaran Al Qur'an di Stockholm, ibu kota Swedia dengan di lindungi aksi terkutuknya oleh polisi Swedia, di dekat gedung Kedutaan Besar Turki, seperti laporan Anadolu, Minggu (22/1/2023).

“Saya sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI mengutuk keras tindakan provokatif ini, yang jelas merupakan kejahatan kebencian terhadap kemanusiaan, terhadap keyakinan Umat Islam diseluruh dunia,” tegas Kharis dalam keterangan pers tertulis kepada media, Ahad (22/01).

Menurutnya, segala tindakan kebencian terhadap keyakinan, rasialisme, Islamophobia yang muncul di barat dengan sikap Swedia yang membiarkan bahkan polisinya menjaga aksi terkutuk itu jelas tidak dapat diterima, dan berharap tindakan tersebut tidak diizinkan, dan itu jelas penghinaan terhadap nilai-nilai sakral yang tidak dapat dibela dengan dasar hak-hak demokrasi.

“Saya meminta Menteri

Luar Negeri mengirimkan nota protes ke Pemerintah Swedia dan segera memanggil Dubes Swedia di Jakarta untuk menegaskan bahwa Indonesia dan khususnya Umat Islam Indonesia amat sangat kecewa atas kejadian terkutuk itu.” jelas

Anggota DPR asal Solo ini Politisi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini juga meminta agar Umat Islam di Indonesia tidak terprovokasi dan tetap mengedepankan Islam yang Rahmatan lil alamin serta mendorong pemerintah RI untuk bersikap tegas dan tidak menolerir segala upaya provokasi dan kebencian terhadap Islam di dalam sikap politik luar negeri Indonesia.

“Di samping amanah konstitusi memperjuangkan Perdamaian dunia perlu langkah bersama menggalang solidaritas dan sebagai rakyat Indonesia kita harus membantu dan terus mengkampanyekan Islam yang Rahmatan Lil alamin dan melawan segala sikap Islamophobia serta aksinya di lapangan,” tutup Legislator Dapil Jawa Tengah V tersebut.

“Saya meminta Menteri Luar Negeri mengirimkan nota protes ke Pemerintah Swedia dan segera memanggil Dubes Swedia di Jakarta untuk menegaskan bahwa Indonesia dan khususnya Umat Islam Indonesia amat sangat kecewa atas kejadian terkutuk itu.”

**Dr. H. ABDUL KHARIS
ALMASYHARI**

Wakil Ketua Komisi I DPR RI



Pembakaran Al Quran di Swedia Aleg PKS: Ini Bisa Melukai Hati Umat Islam Sedunia

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta, mengecam tindakan keji tersebut. "Kami mengutuk keras atas tindakan pembakaran Al Quran oleh politisi sayap kanan Swedia ini. Tindakan keji ini jelas melukai hati umat Islam di seluruh dunia," ungkap Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN DPP PKS), Ahad (22/01).

Jakarta (22/01) — Seorang politisi sayap kanan di Swedia, Rasmus Paludan, melakukan pembakaran kitab suci Al Quran saat aksi demonstrasi untuk memprotes Turkiye terkait keinginan Swedia yang ingin masuk NATO.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta, mengecam tindakan keji tersebut. "Kami mengutuk keras atas tindakan pembakaran Al Quran oleh politisi sayap kanan Swedia ini. Tindakan keji ini jelas melukai hati umat Islam di seluruh dunia," ungkap Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN DPP PKS), Ahad (22/01).

Pihaknya mendorong otoritas Swedia agar mengambil tindakan tegas sepekerunya atas aksi nyata Islamofobia ini. Aksi rasis tidak dapat dibenarkan. "Jangan karena alasan

juga mendorong Pemerintah RI agar secara resmi melayangkan pernyataan kecamatan atas kejadian ini kepada otoritas Swedia dan mendorong adanya jaminan pemerintah agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

"Sikap Rasmus memprotes sikap Turkiye yang ingin Swedia tidak bergabung ke NATO, harusnya jangan diwujudkan dalam bentuk tindakan rasisme. Harusnya itu urusan mereka dengan negara Turkiye, jangan sampai membakar kitab suci karena bisa berurusan dengan umat Islam sedunia, bukan hanya berurusan dengan Turkiye", ujar Anggota DPR dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

"Jangan karena alasan kebebasan berekspresi, tindakan menghina dan melecehkan agama dibiarkan. Apalagi kejadian ini tidak terjadi saat ini saja. Tahun 2022 Rasmus Paludan juga pernah melakukan pembakaran Al Quran,"

H. SUKAMTA, Ph.D
Anggota Komisi I DPR RI



**Hidayat
Nurwahid**

“Pemerintah Swedia agar mereka menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara OKI, dan tidak ‘bermain-main’ dengan hal yang essensial bagi umat Islam, yakni penghormatan terhadap kitab Suci Al-Qur’an,”

Pembakaran Al Quran di Swedia

Melukai Hati Umat Islam Sedunia



Sukamta:

“Jangan karena alasan kebebasan berekspresi, tindakan menghina dan melecehkan agama dibiarkan.



Abdul Kharis

“Saya meminta Menteri Luar Negeri mengirimkan nota protes ke Pemerintah Swedia dan segera memanggil Dubes Swedia di Jakarta

Fraksi PKS DPR RI Kritisi Capaian Kinerja BNN Tahun 2022

Jakarta (18/01) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Achmad Dimiyati Natakusumah memberikan apresiasinya terhadap capaian kinerja BNN Tahun 2022.

“Dari segi realisasi anggaran maka capaian kinerja BNN untuk 2022 semakin baik dan patut diapresiasi.

Hal demikian dapat dicermati dari meningkatnya persentase realisasi anggaran, dari 98,22% (2021) menjadi 98,38% (2022)” tuturnya dalam Rapat Kerja Komisi III bersama Kepala BNN (18/1/23).

Lebih jauh legislator Fraksi PKS itu menerangkan bahwa realisasi anggaran tersebut mencerminkan bahwa program yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sekalipun anggaran yang dikelola BNN meningkat cukup signifikan selama periode tahun tersebut.

Sekalipun demikian Dimiyati Natakusumah memberikan catatan terkait

rencana perencanaan dan pelaksanaan anggaran BNN.

“Hal yang patut menjadi perhatian dalam evaluasi kinerja yaitu kualitas serapan anggaran itu sendiri. Pemaparan dari Kepala BNN patut disambut dengan positif, namun patut pula dikritisi sejauh mana program-program BNN yang telah dilaksanakan itu mulai dari aspek pencegahan, penindakan, rehabilitasi termasuk pemberdayaan masyarakat pada akhirnya dapat berkorelasi positif dalam menurunkan angka prevalensi pengguna narkoba di Indonesia” terang dari alumnus Program Doktor Ilmu Hukum Unpad itu.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba tahun 2021, angka

prevalensi setahun terakhir penyalahgunaan narkoba di Indonesia meningkat sebesar 0,15% dari 1,80% (2019) menjadi 1,95% (2021). Peningkatan ini cukup masif jika ditelaah dari jumlah mutlak penduduk, artinya dalam setahun terakhir ada pengguna aktif narkoba di Indonesia sebanyak 3.662.646 orang.

Untuk meredam eskalasi penyalahgunaan narkoba tersebut diperlukan keseimbangan antara program pencegahan, rehabilitasi dan penindakan. Dalam konteks itu porsi anggaran bidang pencegahan dan pemberantasan perlu disusun dengan lebih proporsional. Sebagai contoh, dalam perencanaan anggaran tahun 2023, anggaran yang dialokasikan untuk bidang pencegahan hanya sebesar 61 Miliar Rupiah atau tidak sampai setengah dari porsi anggaran untuk bidang pemberantasan.

Demikian pula halnya dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas dari pusat rehabilitasi yang dikelola dan bekerja sama dengan BNN. Kita melihat bahwa pelayanan pusat rehabilitasi yang diselenggarakan BNN serta mitra lainnya (31.868 orang) masih jauh dari daya dukung yang diharapkan sesuai dengan tingkat prevalensi Narkoba di Indonesia.

Selengkapnya kunjungi fraksidpr.pks.id



Pemaparan dari Kepala BNN patut disambut dengan positif, namun patut pula dikritisi sejauh mana program-program BNN yang telah dilaksanakan itu mulai dari aspek pencegahan, penindakan, rehabilitasi termasuk pemberdayaan masyarakat pada akhirnya dapat berkorelasi positif dalam menurunkan angka prevalensi pengguna narkoba di Indonesia”

**DR. H. R. A. DIMYATI
NATAKUSUMAH, SH, MH**

Anggota Komisi III DPR RI



Komisi III FPKS: MK Perlu Kuatkan Putusan Pemilu Proporsional Terbuka



Jakarta (26/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi Habib Aboe Bakar Alhabsyi memenuhi undangan Mahkamah Konstitusi (MK) bersama dengan Tim Kuasa Hukum DPR untuk memberikan keterangan dalam perkara gugatan Judicial Review terhadap UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Kamis, (26/1/2023).

Aboe menjelaskan beberapa catatan yang terjadi pada rapat penyusunan UU. Anggota rapat menyampaikan bahwa penerapan sistem proporsional terbuka bertujuan untuk menjalankan kedaulatan rakyat secara nyata dalam kehidupan politik. Rakyat dapat menyeleksi dan memilih calon dari daftar yang disediakan partai.

"Pada kesimpulannya, DPR meminta agar MK menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," ujarnya.

PKS yang juga hadir sebagai pihak terkait berpendapat bahwa MK perlu menguatkan putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 untuk penggunaan sistem proporsional terbuka dalam Pemilu.

Sekretaris Jenderal PKS itu juga menyebut bahwa

kekhawatiran beberapa pihak yang menyebut proporsional terbuka dapat berakibat pada peleman partai tidaklah benar.

"Dalam pengalaman PKS

sebagai partai kader, dengan sistem proporsional terbuka, tetap menjadikan posisi partai yang memegang kendali gagasan anggota legislatif yang ada di forum legislatif," jelasnya.

Ia pun yakin bahwa di setiap partai politik yang ada di Indonesia juga memiliki sejumlah peraturan internal yang mengikat caleg ataupun anggota legislatifnya.

Sistem proporsional terbuka, lanjut Aboe, merupakan solusi dari hegemoni partai politik. Rakyat sebagai pemilih ditempatkan sebagai pemegang mandat utama yang dapat menentukan langsung wakil rakyat yang dipilihnya.

"Dalam pengalaman PKS sebagai partai kader, dengan sistem proporsional terbuka, tetap menjadikan posisi partai yang memegang kendali gagasan anggota legislatif yang ada di forum legislatif, Sistem proporsional terbuka, lanjut Aboe, merupakan solusi dari hegemoni partai politik. Rakyat sebagai pemilih ditempatkan sebagai pemegang mandat utama yang dapat menentukan langsung wakil rakyat yang dipilihnya

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

Pertanyakan Kinerja KKP, Aleg PKS: PNBP Perikanan meningkat, Ironisnya Kesejahteraan Nelayan Menurun

Jakarta (18/01) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan mempertanyakan sekaligus mengapresiasi kinerja Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) dimana pencapaian pendapatan sektor PNBP perikanan yang meningkat hampir 90% dibandingkan tahun lalu.

Namun Johan sangat menyesalkan terjadinya penurunan Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahun 2022 terutama sejak Agustus 2022 hingga bulan ini terlihat kesejahteraan nelayan semakin memprihatinkan.

"Saya mempertanyakan berbagai program KKP yang ternyata belum berdampak pada perbaikan kesejahteraan nelayan, yang hal ini berdampak serius memperburuk iklim perikanan nasional dan semakin menyusutnya jumlah

nelayan di negara kita," hal tersebut disampaikan Johan saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta Selasa (17/01/2023).

Johan meminta KKP memastikan bahwa realisasi pungutan PNBP bukan menyasar para nelayan kecil sehingga semakin memberatkan dan menyusahkan.

"Harus detail mengkategorikan sumber penerimaan PNBP

dengan jelas dan jangan sampai kembali memunculkan polemik dan penolakan luas akibat terlalu bernafsunya KKP untuk mengejar target capaian PNBP", ujarnya.

Politisi PKS ini juga mempertanyakan kinerja KKP dalam program pembangunan kampung nelayan dan kampung budidaya, sebab belum menunjukkan keberhasilannya.

"Pembangunan sentra budidaya seperti 'Kampung Nila' banyak masyarakat menilai belum berhasil dan tidak berdampak pada peningkatan nilai tukar pembudidaya serta konsep tersebut belum mampu membantu para pembudidaya untuk meningkatkan produksi budidaya ikan, demikian juga dengan kebijakan kampung nelayan maju ternyata belum mampu berkontribusi untuk meningkatkan NTN" ucap Johan.



"KKP mesti memperbaiki permasalahan supply demand dimana supply tinggi namun demand masih rendah, serta memperbaiki persoalan logistic ikan, terutama saat ini, biaya logistic relative besar karena adanya keterkaitan sangat erat antara pasokan dari hulu penangkapan ikan hingga pengolahan"

H. JOHAN ROSIHAN, S.T.
Anggota Komisi IV DPR RI

Serapan Beras Tahun 2022
Hampir 1 Juta Ton,

Aleg PKS: Tak Ada Alasan Impor Beras!

Jakarta (18/01) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS pada Rapat Kerja Komisi IV DPR menghadirkan Direktur Utama Bulog, menyampaikan, bahwa data dari Bulog Sendiri memaparkan selama tahun 2022,

Serapan beras petani sudah mencapai hampir 1 juta ton. Bahkan ditambah hingga Januari 2023, serapan beras mencapai 1,1 juta ton.

“Ini mengkonfirmasi, bahwa tidak ada alasan negara ini melakukan impor beras. Artinya Beras itu Ada,” tegas Akmal.

Politisi PKS ini ini menyampaikan, konsumsi beras bangsa ini tidak melebihi jumlah produksi beras yang dihasilkan petani di seluruh Tanah Air. Ia menegaskan bahwa negara ini surplus beras.

Pria kelahiran Kabupaten

Bone ini menambahkan, bahwa BULOG mesti diberikan kesempatan untuk melakukan pembelian beras di petani dengan harga yang baik. Karena ini merupakan kunci bagi BULOG untuk menyerap beras atau gabah yang ada di petani dengan cepat, masif dan efektif.

“Impor ini kan sudah masuk 100 ribu ton kan ya pak Kabulog. Untuk itu, meski kami di FPKS dan mayoritas anggota komisi IV menolak impor beras, ya sudah cukup 100 ribu ton saja karena sudah menjadi

keputusan pemerintah. Jangan ditambah. Karena Maret nanti sudah panen Raya,” Akmal berpendapat.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini menegaskan kepada menteri pertanian yang juga hadir pada kesempatan Raker, bahwa Beras itu ada. Dan ia meminta pemerintah berterima kasih kepada petani Negara Indonesia ini.

“Ada dan tiada kita, petani tetap berproduksi. Kami di Sulsel menjadi penyumbang beras nomor 3 di Indonesia. Dan menjadi penyangga pangan pertama di tanah air ini,” tukas anggota Banggar DPR ini.

Akmal menggaris bawahi, bahwa yang kurang itu bukan beras di Indonesia. Tapi Cadangan Beras Pemerintah yang kurang. Kondisi ini menunjukkan, menurutnya, daya beli Bulog lemah. Bukan berasnya tidak ada.

“Mari kita sama-sama sinkronkan persoalan beras ini masalahnya apa. Kami tidak menginginkan, pangan nasional kita ini dikendalikan importir dan menjadi permainan mereka. Kami di Dapil dituntut keras agar bersuara terkait beras ini. Kita ingin penguatan ketahanan pangan nasional,” Seru Andi Akmal Pasluddin.



“Impor ini kan sudah masuk 100 ribu ton kan ya pak Kabulog. Untuk itu, meski kami di FPKS dan mayoritas anggota komisi IV menolak impor beras, ya sudah cukup 100 ribu ton saja karena sudah menjadi keputusan pemerintah. Jangan ditambah. Karena Maret nanti sudah panen Raya,”

**Dr. H. ANDI AKMAL
PASLUDDIN, S.P., M.M.**

Anggota Komisi IV DPR RI



Potensi Penyelundupan Benih Lobster Tinggi, Aleg PKS Kritisi Tata Kelola BBL

Jakarta (23/01) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menata kembali pengelolaan Benih Bening Lobster (BBL) khususnya terkait mekanisme penangkapan dan perdagangannya.

Hal itu disampaikan saat Rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Selasa (17/01/2023) di Senayan, Jakarta.

Menurut Slamet, nelayan penangkap BBL saat ini mengalami sejumlah kendala dalam menjual hasil tangkapannya dikarenakan belum berkembangnya usaha budidaya lobster dalam negeri padahal dalam PermenKP nomor 16 2022 BBL tidak boleh dijual secara langsung kecuali untuk tujuan pembesaran (Budidaya) di dalam negeri.

"Kebijakan ini sebenarnya sebuah langkah yang sangat baik, namun KKP juga perlu mengakselerasi sentra-sentra budidaya lobster di berbagai daerah agar mempermudah nelayan BBL untuk menjual hasil tangkapannya," ungkap Slamet.

Politisi senior PKS ini juga menegaskan bahwa jika iklim budidaya lobster terlambat untuk berkembang maka secara alamiah para nelayan akan mencari jalan lain untuk

menjual hasil tangkapannya salah satunya adalah potensi penyelundupan BBL akan semakin meningkat, mengingat hal tersebut sangat terkait dengan pendapatan nelayan yang sehari-hari menggantungkan hidupnya dari berburu BBL.

"Di daerah pemilihan saya Kabupaten Sukabumi sangat terkenal sebagai salah satu daerah penghasil BBL namun

belum ada usaha pembesaran lobster disana. oleh sebab itu saya meminta KKP untuk segera membangun beberapa sentra pembesaran lobster sebagai off taker dari BBL hasil tangkapan nelayan," ujarnya.

Dalam kesempatan Rapat tersebut Slamet juga mengapresiasi beberapa capaian-capaian yang dilakukan oleh Menteri KKP, Wahyu Sakti Trenggono dalam memaksimalkan potensi sektor perikanan terhadap perekonomian nasional seperti peningkatan PNPB yang mencapai 1,8 triliun padahal sebelumnya tidak pernah mencapai 1 triliun rupiah harapannya agar sektor perikanan ini terus berkembang sehingga nelayan akan semakin Berjaya di setiap daerah.

Jika iklim budidaya lobster terlambat untuk berkembang maka secara alamiah para nelayan akan mencari jalan lain untuk menjual hasil tangkapannya salah satunya adalah potensi penyelundupan BBL akan semakin meningkat, mengingat hal tersebut sangat terkait dengan pendapatan nelayan yang sehari-hari menggantungkan hidupnya dari berburu BBL.

dr. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI



Tarif Jalan Tol Akan Naik Lagi

**PKS:
Batalan,
Karena
Membebani
Masyarakat!**

Setidaknya terdapat 15 ruas jalan tol yang mengalami penyesuaian tarif pada Januari 2023.

- Tol Jakarta Cikampek II Elevated
- Tol Jakarta Outer Ring Road
- Tol JORR Seksi W2S
- Tol JORR Seksi W2U
- Tol JORR Seksi E
- Tol JORR Seksi S
- Tol JORR Ulujami-Pondok Aren
- Tol Akses Tanjung Priok
- Tol Bintaro Viaduct-Pondok Ranji
- Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang
- Tol Padalarang-Cileunyi
- Tol Palimanan-Kanci
- Tol Pejagan-Pemalang
- Tol Semarang ABC
- Tol Surabaya-Gempol

Kenaikan tarif toll dengan alasan inflasi tidak tepat, karena yg kena dampak inflasi lebih besar justru rakyat. Jangan semua beban pemerintah dan dunia usaha dibebankan kepada rakyat

H. Suryadi Jaya Purnama, S.T. (Anggota Komisi V DPR RI FPKS)





Tahun 2023 Anggaran PSO Rp 3 T, Aleg PKS: Harga Tiket KRL Tidak Boleh Naik!

Jakarta (26/01) --- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat, memberikan catatan penting paska rapat kerja dengan kementerian perhubungan (18/01/2023). Bahwa Kemenhub mengalokasikan anggaran kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) sebesar Rp3,3 triliun untuk kereta api perintis di 2023.

“Dengan adanya rencana anggaran subsidi PSO sebesar itu untuk tahun 2023, saya pikir tidak perlu lagi PT Kereta Api Indonesia (KAI) melempar wacana kenaikan tarif KRL (commuter line) tahun ini. Kami akan memperjuangkan ke Kementerian Keuangan agar dana PSO cair seluruhnya,” ujar Politisi asal Fraksi PKS.

Menurutnya, jika pemerintah pro-rakyat, idealnya tidak akan ada kenaikan untuk saat ini. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sama sekali tidak menyebutkan periode evaluasi dan penyesuaian tarif. Sehingga tidak ada ketentuan yang mewajibkan setiap periode tertentu harus ada kenaikan tarif.

“Yang ada ada adalah bahwa besaran tarif harus diumumkan kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diberlakukan seperti

disebutkan dalam Permenhub No. PM 17 Tahun 2018. Itu pun harus dibicarakan terlebih dulu dengan Kami, Anggota DPR RI,” pungkas Toriq.

Dia juga meminta agar

Pemerintah tidak lagi beranggapan bahwa subsidi PSO, akan lebih produktif jika disalurkan untuk pembangunan prasarana dan peningkatan pelayanan perkeretaapian karena hal tersebut tak memiliki dasar hukum.

“Subsidi ini akan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ketika harga tiket murah dan terjangkau. Jadi tarif kereta api yang sifatnya PSO harus selalu tetap sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan Untuk anggaran perbaikan sarana prasarana dan mutu pelayanan sebaiknya diajukan lagi diluar PSO,” tutup Toriq.

“Subsidi ini akan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ketika harga tiket murah dan terjangkau. Jadi tarif kereta api yang sifatnya PSO harus selalu tetap sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan Untuk anggaran perbaikan sarana prasarana dan mutu pelayanan sebaiknya diajukan lagi diluar PSO,”

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc
Anggota Komisi V DPR RI

Aleg PKS: Beban Rakyat Masih Berat, Jangan Naikan Tarif Tol

Jakarta (17/01) — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al Habsyi menilai sistem Pemilu proporsional terbuka sebagai jalan tengah antara kedaulatan rakyat dan peran partai politik.

Padahal di awal 2023 Kementerian PUPR sudah menaikkan tarif di beberapa ruas, diantaranya tol Pandaan-Malang naiknya yang tarifnya naik sebesar 3,2 persen.

Kenaikan tarif berbasis inflasi ini, kata Suryadi, memang telah diatur dalam Pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan.

"Yang menjadi masalah adalah tarif tol tersebut naik di tengah inflasi yang tinggi sehingga beban masyarakat menjadi semakin meningkat. Badan Pusat Statistik menyatakan inflasi bulan lalu

mencapai 0,66 persen secara bulanan atau 5,51 persen secara tahunan. Adapun inflasi bulanan 0,66 persen pada Desember 2022, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 0,09 persen," terang pria yang akrab disapa SJP ini.

Pengusaha logistik sendiri, imbuhnya, banyak yang mengeluhkan rencana kenaikan tarif tol ini. Bisnis logistik sendiri dipengaruhi banyak faktor diantaranya biaya BBM yang juga beberapa waktu lalu baru naik, harga sewa truk, tarif tol dan lain lain.

"Menurut data dari asosiasi logistik, secara umum

tarif tol porsinya sekitar 37,5 persen terhadap total kegiatan operasional. Sedangkan data dari asosiasi pengusaha truk menyebutkan bahwa harga sewa truk juga sudah mengalami kenaikan. Harga sewa truk kecil naik sekitar 21 persen, sedangkan ukuran besar naik sekitar 23-25 persen," urai Anggota Komisi V DPR RI ini.

Disisi lain, lanjut SJP, layanan jalan tol belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pelayanan ini diberikan berupa standar pelayanan minimal (SPM) seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2014. Dimana dalam Pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan disebutkan bahwa penyesuaian tarif baru bisa dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan SPM yang diantaranya adalah berupa pemeriksaan kemandirian badan jalan, fasilitas rest area, kecepatan kendaraan, faktor keselamatan dan lain lain.

"Khusus dilihat dari aspek keselamatan, data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR

jukkan jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan tol malah terus meningkat. Kecelakaan di jalan tol pada tahun 2019 sebanyak 2.626 kasus, pada tahun 2020 meningkat menjadi 3.907 kasus dan pada tahun 2021 meningkat lagi menjadi 3.988 kasus kecelakaan," sebut Anggota DPR RI dari Dapil NTB 1 ini.

Berdasarkan pengamatan, kata SJP, maka pihaknya meminta Pemerintah untuk tidak menaikkan tarif tol karena pandemi belum usai walaupun PPKM telah dihapus.

"Masyarakat masih membutuhkan ruang untuk bisa bangkit kembali perekonomiannya, apalagi saat ini inflasi juga sedang tinggi dan

masyarakat baru saja mengalami kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sejak September 2022. Kita mengingatkan bahwa dalam menaikkan tarif tol Pemerintah juga harus mempertimbangkan kemampuan bayar pengguna jalan," tegasnya.

Selain itu, lanjut SJP, pihaknya juga mengusulkan agar tarif tol tidak hanya bisa naik, tetapi harus bisa turun sesuai dengan prestasi SPM nya misalnya ketika terjadi kemacetan atau ketika ada jalan yang rusak maka harus ada diskon bagi pengguna jalan tol.

"Yang menjadi masalah adalah tarif tol tersebut naik di tengah inflasi yang tinggi sehingga beban masyarakat menjadi semakin meningkat.

H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T

Anggota Komisi V DPR RI





Frekuensi Gempa Meningkat, Komisi V FPKS: Minta Mitigasi Bencana Diperkuat

Jakarta (16/01) --- Dalam tiga tahun terakhir, aktivitas kegempaan di Indonesia mengalami peningkatan. Jika tahun 2020 tercatat terjadi 8.264 kali gempa, di tahun 2022 gempa yang terjadi naik menjadi 10.792 kali.

Untuk itu, Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo meminta pihak terkait memperkuat mitigasi bencana gempa bumi guna mengurangi risiko akibat bencana ini.

"Saya prihatin dengan musibah gempa bumi yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia beberapa waktu terakhir. Apalagi sampai menelan korban jiwa cukup banyak seperti gempa di Cianjur akhir Nopember lalu. Untuk menghindari kerusakan yang lebih besar daan korban yang lebih banyak, saya minta pihak terkait baik pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat untuk bersinergi dan memperkuat mitigasi bencana gempa," Kata Sigit, Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Berdasarkan data BMKG, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir aktivitas gempa mengalami peningkatan. Ditahun 2020 tercatat terjadi 8.264 kali gempa dan ditahun 2021 meningkat menjadi 10.519 kali.

Ditahun 2022, tercatat

10.792 kali gempa dimana 807 kali gempa yang dirasakan serta 22 kali gempa yang merusak. Dan selama tahun 2022, gempa mematikan terjadi sebanyak 2 kali yaitu gempa Pasaman Barat M 6,3 yang menyebabkan 25 orang meninggal dan gempa Cianjur M 5,6 yang menyebabkan 334 orang meninggal.

Sementara diawal tahun 2023 ini, BMKG mencatat gempa bumi realtime terjadi sebanyak 188 kali, dan 10

gempa diantaranya dengan magnitudo lebih dari 5. Dan yang terbaru gempa dengan M 6,2 terjadi di kabupaten Aceh Singkil pada 16 Januari.

"Dari data BMKG tersebut, terlihat bahwa frekuensi kegempaan di Indonesia meningkat dan punya daya rusak yang cukup besar. Untuk mengurangi risiko akibat bencana, maka upaya antisipasi dan mitigasi bencana gempa harus diperkuat." Kata Sigit.

Berdasarkan Perpres No. 19 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami, penguatan dan pengembangan sistem informasi dilakukan oleh komponen struktur dan komponen kultur.

Selengkapnya kunjungi fraksidpr.pks.id

"Yang masih perlu diperbaiki dan diperkuat adalah komponen kultur. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan mengantisipasi dan menghadapi bencana masih perlu diupgrade. Contoh, hasil temuan penyebab banyaknya korban jiwa saat gempa di Cianjur adalah rumah warga yang tidak tahan gempa. Akibatnya banyak yang roboh dan menewaskan penghuninya.

Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO

Anggota Komisi V DPR RI



Politisi PKS Minta Kemenkop Tingkatkan Penyelesaian Pembayaran Anggota Koperasi

Jakarta (24/01) — Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Nevi Zuairina pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI dengan Anggota KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Sejahtera Bersama akan meminta Kementerian Koperasi agar Kemenkop meningkatkan dan menyelesaikan pembayaran anggota koperasi.

Nevi mendalami, bahwa KSP-SB didirikan pada tanggal 05 Januari Tahun 2004 dengan nama Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSU-SB) yang pada awalnya merupakan koperasi serba usaha yang bergerak dalam berbagai macam usaha diantaranya unit usaha simpan pinjam dan Perdagangan.

"Kami di Komisi VI telah menerima audiensi dan telah mendengar penjelasan perwakilan anggota KSP Sejahtera Bersama. Untuk itu, kami akan mendukung upaya penyelesaian masalah yang dihadapi Anggota KSP Sejahtera Bersama agar nantinya dapat diselesaikan secara menyeluruh termasuk upaya hukum agar masalah ini tidak terulang lagi," kata Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini memandang, bahwa masalah di KSP Sejahtera Bersama ini akibat lemahnya pengawasan terhadap Koperasi

Simpan Pinjam oleh Kemenkop dan UKM.

"Akibat lemahnya pengawasan ini telah membuka celah terjadinya penyimpangan - penyimpangan dalam pengelolaan usaha Koperasi,"

ungkapnya.

Politisi PKS ini menerangkan, bahwa dirinya dan Komisi VI akan menindaklanjuti masalah terkait KSP Sejahtera Bersama. Komisi VI, lanjut Nevi, melalui pimpinan akan memanggil Kemenkop UKM beserta satgas koperasi.

"Sesuai dengan hasil rapat, kami akan meminta Kemenkop UKM untuk menindak lanjuti serta melakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap KSP Sejahtera Bersama," tutup Nevi Zuairina.

"Kami di Komisi VI telah menerima audiensi dan telah mendengar penjelasan perwakilan anggota KSP Sejahtera Bersama. Untuk itu, kami akan mendukung upaya penyelesaian masalah yang dihadapi Anggota KSP Sejahtera Bersama agar nantinya dapat diselesaikan secara menyeluruh termasuk upaya hukum agar masalah ini tidak terulang lagi,"

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Terkait Joki dalam Rekrutmen Pegawai BUMN, Politisi PKS Desak Pemerintah Perbaiki Sistemnya

Jakarta (18/01) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak meminta pemerintah mengevaluasi sistem rekrutmen Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Amin merespon kisruh terkait dugaan praktik perjkian dalam rekrutmen BUMN batch 2 yang dilaksanakan akhir Desember 2022 hingga awal Januari 2023 lalu.

Wakil Rakyat dari Dapil Jatim IV itu menilai, prosedur dan tahapan seleksi pegawai BUMN saat ini sebetulnya sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya.

"Namun ternyata, masih meninggalkan celah yang memungkinkan terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan tes, baik tes kemampuan dasar (TKD) maupun tes kemampuan Bahasa Inggris," ungkapnya.

Merujuk kepada data dan fakta yang terungkap untuk sementara ini, celah yang diduga dimanfaatkan oknum joki seleksi karyawan BUMN bukan terletak pada prosedur dan tahapannya.

Amin melihat ada dua hal yang menjadi celah praktik kecurangan itu terjadi.

Pertama, mekanisme pengawasan peserta saat melaksanakan TKD dan Tes Bahasa Inggris.

Karena itu, Amin meminta Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Kementerian BUMN menyempurnakan aplikasi digital yang digunakan untuk

TKD dan Tes Bahasa Inggris saat ini.

Dalam kaitan ini, Amin meminta agar aplikasi tes secara daring dilengkapi dengan fitur yang mampu membaca gestur peserta dan menganalisisnya, apakah dia melanggar aturan permainan selama seleksi atau tidak.

"Misalnya, sistem mampu mendeteksi adanya komunikasi antara peserta dengan joki untuk mendapatkan bantuan saat tes, melalui gestur wajah maupun tubuh," pungkasnya.

Selain itu, imbuh Amin, semestinya soal dan jawaban tes dienkripsi secara ketat dan tidak mudah diretas sehingga tidak bisa di screenshot atau tangkapan layar.

"Di media sosial sempat viral yang menyebut ada percakapan di sebuah grup telegram berisi tutorial membuat tangkapan layar (screen shoot) soal ujian untuk kemudian dibantu pemecahan soal tersebut oleh Joki," kata Amin.

Grup medsos tersebut dibentuk oleh sebuah lembaga bimbingan belajar yang mana

warkan bimbingan dan pelatihan pemecahan soal TKD dan Tes Bahasa Inggris untuk soal-soal pada batch sebelumnya. Diperkirakan ada lebih dari 300 peserta yang tergabung dalam grup medsos tersebut.

"Penyempurnaan aplikasi tes berikutnya adalah melengkapi aplikasi dengan akurasi data fisik peserta, misalnya melalui fitur pengenalan wajah, untuk mencegah peserta digantikan oleh Joki saat mengikuti tes," sebut Amin.

Selanjutnya hal kedua yang harus dievaluasi dan diperbaiki, lanjut Amin adalah kualitas soal TKD dan Tes Bahasa Inggris.

"Kualitas disini lebih kepada penyusunan soal yang berbeda pada setiap batch, bahkan jika perlu dibuat pengelompokan soal berdasarkan pengelompokan (clustering) BUMN," ujarnya.

Sehingga, imbuh Amin, soal-soal Tes untuk klaster BUMN Karya berbeda dengan BUMN klaster keuangan misalnya.

"FHCI harus membuat Bank Soal Tes dalam jumlah besar, aman, rahasia, dan juga diawasi oleh sistem pengawasan yang ketat agar soal tidak bocor dan beredar," pungkasnya.

"Di media sosial sempat viral yang menyebut ada percakapan di sebuah grup telegram berisi tutorial membuat tangkapan layar (screen shoot) soal ujian untuk kemudian dibantu pemecahan soal tersebut oleh Joki



AMIN AK, M.M.
Anggota Komisi VI DPR RI



**Follow
Akun tiktok
Fraksi PKS DPR RI**

@fraksipksdprri

Aleg PKS: Preseden Buruk, Presiden Jokowi Langgar UU PPP

Jakarta (25/01) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menyebut Pemerintah telah melanggar ketentuan UU No.13 Tahun 2022, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait pembahasan RUU EBET.

Pasalnya daftar inventarisasi masalah (DIM) yang seharusnya diserahkan Pemerintah ke DPR, paling lambat 60 hari sejak diterimanya surat dari DPR-RI, namun baru diterima dan dibahas kemarin, Selasa, 24/1/2023.

Artinya pengiriman DIM tersebut sudah jauh melewati batas waktu yang ditentukan Undang-undang. Surat Presiden-nya sendiri dikirim 21 September 2022 namun tanpa DIM.

Karena itu, Mulyanto, meminta kepada Pemerintah dan Pimpinan Komisi VII untuk memitigasi risiko RUU EBET, yang akan dibahas. Tujuannya agar tidak cacat hukum dan dibatalkan MK bila kelak sudah diketok. Atau setidaknya tidak

diajukan judicial review oleh masyarakat.

"DIM memang sudah diterima oleh DPR RI, namun dari segi waktu sudah jauh melewati batas yang diatur UU, yakni 60 hari setelah RUU dikirim oleh DPR RI. Karenanya, Pemerintah telah menabrak UU No.13/2022 Tahun 2022, khususnya Pasal 49 Ayat 2," ungkapnya.

"Di sana dikatakan bahwa presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang disertai dengan daftar inventarisasi masalah (DIM) bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima," ujarnya.

Mulyanto khawatir, undang-undang yang dihasilkan itu dianggap cacat hukum.

"Saya khawatir persoalan ini dianggap cacat hukum. Kita khawatir akan diajukan judicial review ke MK," ujarnya.

Rapat Kerja yang baru dimulai langsung diskors 10 menit, tak lama setelah berjalan. Hal itu terjadi karena awalnya Anggota Komisi VII Fraksi PKS Mulyanto menyebut jika pembahasan RUU melanggar aturan. Sebab, DIM diterima jauh dari jadwal yang ditentukan.

Untuk diketahui, Komisi VII DPR memanggil Menteri ESDM Arifin Tasfir untuk membahas Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) kemarin.

Hadir juga dalam rapat ini Wakil Menteri BUMN Pahala N Mansury, Wakil Menteri LHK, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu, dll.

Rapat dimulai sekitar pukul 14.00 WIB, Selasa (24/1/2023). Rapat dibuka dan dipimpin Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto.

Adapun agenda rapat yakni mekanisme pembahasan RUU EBET, pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU EBET dan pengesahan pembentukan panja, tim perumus, tim kecil dan tim sinkronisasi.



“DIM memang sudah diterima oleh DPR RI, namun dari segi waktu sudah jauh melewati batas yang diatur UU, yakni 60 hari setelah RUU dikirim oleh DPR RI. Karenanya, Pemerintah telah menabrak UU No.13/2022 Tahun 2022, khususnya Pasal 49 Ayat 2,”

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI



Aleg PKS Soroti Keterlambatan Pengiriman DIM RUU EBET oleh Pemerintah

Mengacu pada UU No 13 tahun 2022 tentang UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3), bahwa Pemerintah harus memberikan Surat Presiden (Surpres) bersamaan dengan DIM maksimal 60 hari sejak surat dari Pimpinan DPR diterima. Meski Surpres telah dikirimkan dalam waktu yang ditentukan, namun DIM belum disertakan. Sehingga secara hitungan waktu dianggap telah melebihi dari ketentuan yang ada.

Jakarta (26/01) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Diah Nurwitasari menyoroti keterlambatan pengiriman Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EB - ET) oleh Pemerintah Pusat.

Perjalanan RUU EB-ET yang merupakan RUU Inisiatif Usulan DPR RI mengalami proses yang cukup panjang. Sejak diakhiskan sebagai RUU Inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna pada Selasa (14/06/2022), proses perkembangan RUU EB-ET seakan jalan ditempat, karena hingga akhir tahun 2022 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) juga belum diterima oleh DPR.

Mengacu pada UU No 13 tahun 2022 tentang UU Pembentukan Peraturan Per-

undang-undangan (P3), bahwa Pemerintah harus memberikan Surat Presiden (Surpres) bersamaan dengan DIM maksimal 60 hari sejak surat dari Pimpinan DPR diterima. Meski Surpres telah dikirimkan dalam waktu yang ditentukan, namun DIM belum disertakan. Sehingga secara hitungan waktu dianggap telah melebihi

dari ketentuan yang ada.

Politisi Perempuan PKS tersebut menyoroti keterlambatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengirimkan DIM RUU EBET.

"Bagaimana konsekuensi atas keterlambatan dalam pengiriman DIM ini? jangan sampai produk hukum yang kita buat pada akhirnya dianggap cacat hukum karena ada pelanggaran secara prosedural", ujar Diah

Setelah rapat diskors 10 menit untuk berdiskusi, akhirnya disampaikan oleh Pimpinan Komisi VII DPR RI, bahwa terkait keterlambatan pengiriman DIM, Pemerintah akan mengirimkan surat penjelasan secara detail mengenai penyebabnya. Rapat kerja dilanjutkan dengan membuat pembagian Panitia Kerja (Panja) RUU EB - ET yang ditugaskan secara khusus untuk mendalami DIM RUU EB - ET.

"Bagaimana konsekuensi atas keterlambatan dalam pengiriman DIM ini? jangan sampai produk hukum yang kita buat pada akhirnya dianggap cacat hukum karena ada pelanggaran secara prosedural",

Dipl.Ing. Hj. **DIAH NURWITASARI**, M. I. POL.
Anggota Komisi VII DPR RI



Aleg PKS: Proses Kebijakan Transisi Energi Perlu Sinergi Semua Elemen Bangsa

Jakarta (16/01) — Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PKS, Diah Nurwitasari, menegaskan bahwa proses transisi energi di Indonesia memerlukan kerjasama dari semua elemen bangsa.

Menurut Diah Nurwitasari, yang hadir dalam kegiatan diskusi bersama NGO-NGO yang berfokus pada kebijakan energi. Diskusi tersebut membahas mengenai Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru - Energi terbarukan (EB-ET) untuk implementasi Kebijakan Transisi Energi.

Legislator perempuan PKS asal Jawa Barat tersebut menyatakan bahwa Pemerintah tidak konsisten dalam memperjuangkan RUU EB-ET ini dan terkesan hanya pencitraan semata. Hal tersebut dikarenakan secara proses dapat dilihat kelambatan Pemerintah dalam pelaksanaannya.

"Sejak disahkan dalam paripurna sebagai RUU Inisiatif DPR di bulan Juni 2022, pemerintah hingga akhir tahun 2022 masih belum mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai langkah lanjutan dalam proses pembahasan RUU.", ujar Politisi PKS itu.

Diah juga menuturkan bahwa Fraksi PKS telah memberikan pandangan fraksi terhadap RUU EB-ET sebanyak

12 (dua belas) catatan penting. Dimana pandangan ini menjadi pandangan yang dianggap cukup komprehensif oleh berbagai pihak yang memperhatikan isu tersebut.

Politisi lulusan Jerman itu juga menyatakan keinginan dirinya bersama Fraksi PKS untuk dapat terus memperjuangkan RUU EB-ET bersama elemen bangsa lain yang juga memiliki harapan dalam proses transisi energi di Indonesia.

"Saya mengajak kita semua untuk terus mencerdaskan generasi bangsa, khususnya pemahaman mengenai transisi energi menjadi urgensi bangsa kita.", tutur Diah

Diah yang juga merupakan anggota dari Panja RUU EB-ET menyatakan bahwa pandangan-pandangan dalam diskusi dari berbagai pihak tentu menjadi tambahan bagi celah yang ada dalam RUU EB-ET itu sendiri. Sehingga diskusi menjadi sarana yang tepat untuk dapat mengelaborasi pandangan tersebut.

Diskusi tersebut turut dihadiri oleh berbagai lembaga, seperti Indonesian Parliamentary Center, Trend Asia, Greenpeace, dan jaringan LSM maupun media lainnya.

Fraksi PKS telah memberikan pandangan fraksi terhadap RUU EB-ET sebanyak 12 (dua belas) catatan penting. Dimana pandangan ini menjadi pandangan yang dianggap cukup komprehensif oleh berbagai pihak yang memperhatikan isu tersebut.

Dipl.Ing. Hj. **DIAH NURWITASARI, M. I. POL.**
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat II

BLIK INDONESIA



**Menag Usul Biaya
Haji Jadi Rp. 69 Juta,
Aleg PKS: Terlalu Tinggi,
Harus Diturunkan!**

Jakarta (20/01) --- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, menyatakan bahwa usulan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih)

yang diajukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) sebesar 69 juta per jemaah dinilai terlalu besar sehingga perlu diturunkan.

"Saya tegaskan bahwa Fraksi PKS selalu berusaha membela kepentingan umat dan kepentingan rakyat. Atas dari itu, PKS menilai, memang biaya (Bipih) yang diusulkan oleh Menteri Agama terlalu tinggi sehingga perlu dikaji lebih dalam agar kita bisa menurunkan biaya itu, bisa terjangkau, nyaman bagi masyarakat", ujar Bukhori dalam acara PKS Legislative Corner, Jumat (20/01).

Menurut Bukhori, meskipun naik, biaya perjalanan haji yang dibebankan kepada jemaah jangan terlalu besar perbedaannya dibanding tahun lalu.

"Jika melihat usulan Pemerintah sekarang, angkanya hampir mencapai dua kali lipat dari biaya yang dibebankan tahun lalu. Di angka 69 juta rupiah. Fraksi PKS akan berusaha keras menurunkan biaya haji agar tak seperti yang diusulkan Pemerintah saat ini", tegasnya lagi.

Sebagai informasi, Kementerian Agama (Kemenag)

baru-baru ini telah mengusulkan kebijakan teranyar soal penyelenggaraan haji. Menag mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 sebesar Rp 98.893.909. Dari angka Rp 98,8 juta itu, biaya yang dibebankan kepada jemaah haji adalah sebesar Rp 69 juta. Padahal, pada tahun 2022 lalu, biaya yang dibebankan hanya berada di angka Rp 39 juta.

"PKS menilai, memang biaya (Bipih) yang diusulkan oleh Menteri Agama terlalu tinggi sehingga perlu dikaji lebih dalam agar kita bisa menurunkan biaya itu, bisa terjangkau, nyaman bagi masyarakat"

**KH. BUKHORI,
Lc., M.A.**

Anggota Komisi VIII DPR RI



Politisi PKS Desak Kemenag Rancang BPIH yang Rasional Tapi Terjangkau

Jakarta (22/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis mendesak Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) segera menghitung Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023 agar bisa terjangkau petani dan nelayan yang merupakan calon jemaah haji terbanyak.

Hal itu diungkapkan Iskan Lubis dalam rapat kerja Komisi VIII bersama Kementerian Agama (Kemenag) kemaren siang di kompleks DPR RI, Senayan.

"PKP mengingatkan itu jangan sampai BPIH menggerus dana pokok calon haji. Nah saya berharap menteri agama lebih transparan dalam merumuskan dana haji dan tentunya DPR akan mengkritisi," ungkap Iskan

Menurutnya temuan KPK ini dapat diartikan sebagai peringatan bagi Kemenag dan BPKH untuk berhati hati dalam mengelola dana haji bersama BPKH yang mengakibatkan biaya haji jadi mahal bukan karena biaya haji yang naik di Saudi, tetapi karena salah kelola dana haji.

"Sebab kalau dana haji dikelola dengan optimal oleh BPKH membuat biaya haji yg dibayar jemaah juga lebih murah," ucap Iskan saat menyampaikan pendapat di ruang rapat komisi VIII DPR RI,

pelunasan biaya hajinya.

Dalam kesempatan rapat itu juga Iskan menyampaikan Kemenag untuk dapat membuat road map bagi lansia kedepannya agar mereka lebih diutamakan keberangkatannya.

Ada dugaan bahwa oknum Travel tertentu mendorong jemaah haji untuk menarik setoran awal mereka untuk berangkat dengan umroh karena lamanya antrian.

"Setoran awal haji yg 25 juta dan antri puluhan tahun ketika ditarik dana yg mengendap puluhan tahun toh tidak untung sama sekali," ungkap Iskan

“Temuan KPK ini dapat diartikan sebagai peringatan bagi Kemenag dan BPKH untuk berhati hati dalam mengelola dana haji bersama BPKH yang mengakibatkan biaya haji jadi mahal bukan karena biaya haji yang naik di Saudi, tetapi karena salah kelola dana haji.”

**H. ISKAN QOLBA
LUBIS, M.A.**

Dapil Sumatera Utara II

Indonesia Darurat Kejahatan Seksual Anak

HNW: Semua Pihak Harus Maksimalkan Upaya Selamatkan Anak

Jakarta (18/01) — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, menyayangkan terulang kembalinya kejahatan seksual terhadap anak,

seperti kasus pemerkosaan anak di Brebes, serta menilai bahwa Indonesia sudah masuk ke dalam darurat kejahatan seksual anak sehingga seluruh pihak perlu memaksimalkan upaya penyelamatan anak.

“Darurat kejahatan seksual terhadap anak ini juga telah diumumkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sehingga semua pihak selamatkan anak selaku generasi yang akan meneruskan memimpin Indonesia Emas

pada 2045 mendatang,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (18/01).

HNW sapaan akrabnya berharap agar kasus-kasus serupa perlu dilakukan pengusutan melalui mekanisme proses hukum yang tegas dan transparan.

HNW juga menyayangkan adanya upaya penyelesaian kasus di Brebes tersebut dengan upaya ‘perdamaian’, padahal seharusnya tindak pidana semacam ini sudah masuk ke ranah aparat penegak hukum. Oleh

karenanya, ia mendesak agar aparat penegak hukum secara profesional mengusut kasus dan menghukum tegas pelaku.

“Perdamaian itu memang suatu hal yang baik. Namun, tidak dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak yang sudah dalam kondisi darurat di Indonesia saat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus mengusut tuntas dan tegas melalui mekanisme yang berlaku kepada pelakunya, untuk menimbulkan efek jera sehingga kasus serupa tidak lagi terulang,” ujarnya.

HNW sapaan akrabnya mengatakan pihak-pihak terkait seperti Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenppa) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk segera bergerak membantu korban dan keluarganya, terutama pemulihan trauma dan serta edukasi untuk mendorong perkarnya dibawa ke proses hukum.

“Pendampingan terhadap korban dan keluarga korban juga penting, serta pemahaman bahwa kasus ini memang seharusnya diselesaikan di meja peradilan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anggota Komisi VIII DPR RI yang salah satunya membidangi perlindungan perempuan dan anak ini berpendapat bahwa instrumen hukum berupa undang-undang serta aturan turunannya untuk menjerat pelaku sudah sangat memadai.

Di antaranya, adalah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah melalui UU No. 17 Tahun 2016, dan juga UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual.

“Instrumen-instrumen hukum itu sudah sangat layak untuk digunakan oleh pelaku.

Sekarang, bagaimana aparat penegak hukum bisa maksimal menggunakannya. Karena aturan hukum tersebut hanya menjadi teks yang kosong, apabila tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk melindungi rakyatnya,” tuturnya.

Selengkapnya kunjungi fraksidpr.pks.id



Aparat penegak hukum harus mengusut tuntas dan tegas melalui mekanisme yang berlaku kepada pelakunya, untuk menimbulkan efek jera sehingga kasus serupa tidak lagi terulang,

**Dr. H.M. HIDAYAT
NUR WAHID, M.A**

Anggota Komisi VIII DPR RI

PROGRAM UNGGULAN

FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kreatif, Aktif, Substantif

Parlementaria (Diskusi Publik,
PKS Legislative Corner, PKS Legislative Report,
Ruang Aleg dan Internshipsks)



Diskusi, dialog, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan pejabat publik, pakar, ahli, tokoh CSO, dan aktivis yang kompeten serta generasi muda untuk membahas, mengkaji, dan terlibat pada isu-isu publik dari sudut pandang parlemen.



Wakil Ketua FPKS: RUU Kesehatan Harus Majukan Re- formasi Kesehatan Bukan Sebaliknya

Jakarta (23/01) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetyani berharap RUU Kesehatan yang dibahas Baleg DPR RI bersama pemerintah harus dapat mendorong reformasi kesehatan di Indonesia.

"RUU Kesehatan saat disahkan menjadi UU diharapkan dapat memajukan reformasi kesehatan di Indonesia, bukan malah menyebabkan kemunduran. Oleh karena itu, RUU ini harus dibahas dengan matang, komprehensif dan tidak grasak-grusuk sebagaimana yang pernah terjadi di RUU Cipta Kerja," kata Netty, Senin, (23/01).

"Semua mekanisme dan aturan main dalam penyusunan RUU harus dihormati dan dijalankan. Selain itu dengan metode omnibus law dan pembahasan yang 'ngebut' berapa banyak UU yang tidak berlaku, pasal yang hilang, dan esensi yang ditinggalkan," katanya.

Netty juga berharap RUU ini nantinya dapat menyelesaikan masalah-masalah klasik yang sampai saat ini masih menghantui kesehatan di Indonesia.

"Penyelesaian problem krusial seperti kekurangan nakes, kesenjangan kualitas dan pemerataan SDM serta fasilitas kesehatan di daerah-daerah, pendidikan profesi,

pelayanan kesehatan prima, pengentasan stunting dan sebagainya harus menjadi perhatian utama," kata Netty.

Politisi asal Jawa Barat ini juga meminta agar penyusunan RUU ini dapat menampung berbagai masukan dan aspirasi dari masyarakat dan pihak-pihak yang berkaitan langsung.

"Masukan-masukan yang positif dari masyarakat, organisasi profesi, pakar

kesehatan dan lain-lain harus ditampung, diakomodir dan diimplementasikan. Dengarkan suara-suara tersebut dengan baik dan bijaksana. Kita tidak ingin setelah RUU tersebut disahkan, baru terlihat banyak bolongnya di sana-sini," katanya.

Terakhir Netty menyinggung soal metode yang digunakan dalam penyusunan RUU tersebut.

"Apakah metode omnibus law cocok digunakan untuk membahas kebutuhan kesehatan sebagai hak fundamental rakyat? Karena akan ada 13 UU yang terdampak di dalamnya," kata Netty.

RUU Kesehatan saat disahkan menjadi UU diharapkan dapat memajukan reformasi kesehatan di Indonesia, bukan malah menyebabkan kemunduran. Oleh karena itu, RUU ini harus dibahas dengan matang, komprehensif dan tidak grasak-grusuk sebagaimana yang pernah terjadi di RUU Cipta Kerja,

Dr. Hj. NETTY PRASETYANI, M.Si
Anggota Komisi IX DPR RI

Bentrok Pekerja di Morowali, Politisi PKS Minta Investigasi Transparan demi Keselamatan Pekerja

Jakarta (17/01) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati meminta dilakukan penyelidikan yang transparan dan akuntabel

terhadap kejadian bentrok Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang membuat jatuhnya tiga korban jiwa dan kerusakan lainnya PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Kurniasih menekankan penyelidikan juga bisa dilakukan oleh unsur independen dengan melibatkan penegak hukum dan pemerintah untuk mendapatkan akar masalah yang sebenarnya dari kejadian bentrok tersebut.

"Kita turut prihatin atas jatuhnya korban jiwa dari kejadian ini. Keselamatan para pekerja terutama anak bangsa harus dilindungi. Adanya kejadian ini pasti ada akar penyebabnya. Itu yang harus

ditemukan. Jangan sampai hanya berhenti pada penyebab pada saat kejadian semata tapi perlu ditarik ke belakang faktor apa saja yang akhirnya membuat kejadian ini meletus," ungkap Kurniasih dalam keterangannya di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/01).

Terlebih lagi belum lama juga ada kejadian kecelakaan kerja yang mengakibatkan dua pekerja di PT GNI meninggal karena crane terbakar dan terjebak di dalamnya.

Kurniasih menekankan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 adalah wajib harganya. Sehingga perlindungan pekerja khususnya anak-anak bangsa

benar-benar terjamin.

"Mungkin tim investigasi sekaligus bisa mengevaluasi bagaimana pelaksanaan prosedur K3 untuk melindungi keselamatan kerja. Selain itu informasi tentang aksi mogok serikat pekerja sebelum kejadian ini juga perlu digali lebih dalam. Intinya harus ditegaskan aturan yang adil bagi semuanya tanpa membedakan-bedakan," tegas Kurniasih.

"Jika akar masalahnya sudah ketemu dan ada solusi yang adil bagi semuanya tentu kita tidak mengharapkan kejadian ini terulang di masa depan. Ini juga harus menjadi perhatian bagi perusahaan yang dalam proyeknya juga menggunakan tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia," tambah dia.



Jika akar masalahnya sudah ketemu dan ada solusi yang adil bagi semuanya tentu kita tidak mengharapkan kejadian ini terulang di masa depan. Ini juga harus menjadi perhatian bagi perusahaan yang dalam proyeknya juga menggunakan tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia,"

Dr. Hj. KURNIASIH, M.Si.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

Ribuan Ajuan Pernikahan Dibawah Umur, Aleg PKS Tegaskan Perlunya Penguatan Preventif

Jakarta (16/01) — Keriuhan berita terkait permohonan dispensasi nikah ratusan anak di Ponorogo ditanggapi anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah dengan penuh keprihatinan.

"Angka 191 yang diramaikan itu baru di Ponorogo. Padahal di propinsi dan kota-kota lain pun kita mengalami kasus yang sama. Sebut saja di kota pelajar, Yogyakarta, untuk tahun 2022 lalu angkanya mencapai 556 anak. Lalu di dapil saya Kota Bandung, sampai September 2022 saja sudah ada 125 anak yang terdata mengajukan dispensasi pernikahan. Ini tentu kondisi yang sangat memprihatinkan," ungkap Ledia.

Berdasarkan laporan dari kantor pengadilan agama di berbagai wilayah, angka pengajuan dispensasi nikah anak di Indonesia memang

masih tinggi. Sedikit contoh selama 2022 Kota Samarinda mencatat angka 681 ajuan, Banda Aceh 507 ajuan, Blitar 489 ajuan, kabupaten Bojonegoro 486 ajuan, Majalengka 467 ajuan, Kabupaten Batang 380 ajuan, Pekalongan 292 ajuan, Jepara 240 ajuan, Klaten 206 ajuan, Cianjur 177 ajuan, kabupaten Enrekang Sulsel 98 ajuan, Kolaka Utara Sulteng 52 ajuan, Lombok Tengah 47 ajuan.

Ledia mengingatkan bahwa pernikahan dini punya potensi besar pada murahnya masa depan anak bangsa.

"Pernikahan itu selainya kan dipersiapkan dengan

sepenuh kematangan. Kematangan fisik, psikis, emosi termasuk ekonomi. Sementara ajuan dispensasi nikah mereka yang masih di bawah umur ini justru abai terhadap hal tersebut. Maka ancaman meningkatnya angka kemiskinan, perceraian hingga kematian ibu dan bayi membayangi masa depan generasi kita."

Apalagi dua alasan yang paling banyak melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah ini adalah hamil di luar nikah dan alasan keterbatasan ekonomi.

Selengkapnya kunjungi fraksidpr.pks.id



Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T

Anggota Badan Legislasi DPR RI

"Pernikahan itu selainya kan dipersiapkan dengan sepenuh kematangan. Kematangan fisik, psikis, emosi termasuk ekonomi. Sementara ajuan dispensasi nikah mereka yang masih di bawah umur ini justru abai terhadap hal tersebut. Maka ancaman meningkatnya angka kemiskinan, perceraian hingga kematian ibu dan bayi membayangi masa depan generasi kita."

Terkait Ratusan Dispensasi Nikah di Ponorogo

Aleg PKS Pertanyakan Implementasi Profil Pelajar Pancasila

Jakarta (19/01) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahmy Alaydroes, menyampaikan keprihatinannya

atas kasus 191 orang pelajar hamil yang mengajukan dispensasi nikah dini ke Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur sepanjang tahun 2022 sebagaimana yang ramai diberitakan di berbagai media.

Anggota DPR RI dari komisi pendidikan ini menyekalkan kasus tersebut, dimana para pelajar yang seharusnya fokus menimba ilmu, mengukir prestasi, membina karakter diri, menapaki tahap penting dalam mengumpulkan bekal untuk meraih cita-cita demi masa depan yang cerah, justru

terperosok ke dalam kubangan lumpur perilaku yang amoral, menentang nilai-nilai Susila, nilai Pancasila dan nilai agama. Demikian rilis yang dikirimkan kepada media.

Keprihatinan Fahmy yang juga merupakan pemerhati, sekaligus pegiat pendidikan ini semakin menjadi, karena kasus ini merupakan pukulan yang sangat berat bagi dunia pendidikan, kita yang seharusnya membentengi para pelajar dari arus gelombang kerusakan moral.

"Perilaku seks bebas yang terungkap di Ponorogo itu,

bukan tidak mungkin merupakan fenomena gunung es, yang terjadi dan belum terungkap mungkin lebih banyak lagi. Perilaku amoral seksual di kalangan pelajar merupakan tamparan keras, dan memberi informasi kepada kita betapa buruknya Pendidikan moral, Pendidikan karakter di dunia pendidikan kita", ujarnya.

Fahmy yang juga penggagas, pendiri, Sekolah Islam Terpadu mempertanyakan sejauhmana implementasi Profil Pelajar Pancasila sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendikbud Tahun 2020-2024. Fahmy menyebutkan bahwa penerapan konsep Profil Pelajar Pancasila hanya 'macan kertas', karena realitanya sikap dan perilaku pelajar-pelajar kita, justru bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Fahmy mengingatkan bahwa ciri utama Profil Pelajar Pancasila yang paling mendasar sebelum ciri yang lainnya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.

"Saya mengajak seluruh elemen bangsa, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, khususnya Kemendikbudristek, Kemenag, Kemenkes, para pemuka agama, para guru, hingga para

orang tua untuk bersama-sama menjaga dan mencegah agar kasus serupa tidak terulang atau bahkan meluas ke kota lainnya," bebernya.

Fahmy juga mengingatkan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak hanya fokus kepada pencegahan tindakan kekerasan seksual,

tetapi membiarkan (abai) terhadap perilaku seks bebas yang dilakukan suka sama suka. Inilah yang sejak awal dikhawatirkan politisi PKS ini terkait implikasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12/2022).

Selengkapnya kunjungi fraksidpr.pks.id



"Perilaku seks bebas yang terungkap di Ponorogo itu, bukan tidak mungkin merupakan fenomena gunung es, yang terjadi dan belum terungkap mungkin lebih banyak lagi. Perilaku amoral seksual di kalangan pelajar merupakan tamparan keras, dan memberi informasi kepada kita betapa buruknya Pendidikan moral, Pendidikan karakter di dunia pendidikan kita"

**Dr. H. FAHMY
ALAYDROES, MM, M.Ed**
Anggota Komisi X DPR RI



Aleg PKS: Persoalan Pariwisata di Indonesia pada Kelembagaan dan Pengelolaannya

Jakarta (21/01) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mustafa Kamal menanggapi persoalan Pariwisata di Indonesia dalam RDPU Panja RUU Pariwisata di Komisi X DPR RI, Rabu, (18/01/2023)

Menurut Mustafa, permasalahan dalam kepariwisataan di Indonesia terletak pada kelembagaan. "Saya merasa masalah utamanya dari mulai kelembagaan yang diberikan kewenangan untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia, kelembagaan ini harus diperkuat lagi melalui undang-undang," terang Anggota Komisi X DPR RI ini.

Pariwisata, imbuh Mustafa, menjadi suatu yang strategis dalam kemajuan negara bahkan Sebuah negara yang pariwisatanya maju mencerminkan keseluruhan capaian negara itu.

Secara wilayah, lanjutnya, Indonesia diantara dua benua dan berada di 'ring of fire' kemudian negeri kepulauan yang membuat Indonesia mempunyai banyak budaya dan potensi pariwisata.

"Saya kira tidak ada satupun yang tidak bisa kita jual di negeri ini dalam konteks pariwisata kalo kita bisa bersinergi dalam pembangunan dan semua sudut di negeri ini punya nilai pariwisata," kata Anggota DPR RI dari Dapil

Sumsel I ini.

Mustafa ingin undang-undang pariwisata ini bisa mengkomodir semua potensi pariwisata di Indonesia.

"Saya yakin kalau pariwisata Indonesia maju Indonesia juga akan maju," tutup Mustafa tegas.

Saya kira tidak ada satupun yang tidak bisa kita jual di negeri ini dalam konteks pariwisata kalo kita bisa bersinergi dalam pembangunan dan semua sudut di negeri ini punya nilai pariwisata,"

**H. MUSTAFA
KAMAL, S.S.**
Anggota Komisi X DPR RI



2023 Tanpa Dana PEN

Aleg PKS: Pemerintah Harus Fokus Jaga Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga

Jakarta (19/01) --- Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada akhir 2022 menegaskan bahwa Komite Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) akan selesai akhir tahun 2022.

Pemerintah juga tidak mengalokasikan dana khusus untuk PC-PEN di APBN 2023. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan realisasi Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) sejak 1 Januari-9 Desember 2022 telah mencapai Rp330,7 triliun atau 72,6 persen dari pagu Rp455,62 triliun.

Realisasi tersebut didorong oleh klaster perlindungan masyarakat yang mencapai Rp148,2 triliun atau 95,8 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp154,76 triliun.

Terkait dengan penyerapan dana PEN tahun 2022, Anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi PKS, Anis Byarwati menilai bahwa penyerapan anggaran masih terus menjadi persoalan di Indonesia.

Padahal, ekonomi nasional membutuhkan stimulus besar untuk mendukung pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19.

"Saya melihat penyerapan anggaran PEN ini memang cukup rendah sejak 2020. Dalam kaitannya dengan indikasi pemulihan ekonomi, kelihatan

masih jauh dari kondisi sebelum pandemi Covid-19," kata Anis.

"Konsumsi belum sepenuhnya pulih bahkan dapat dikatakan menurun karena kenaikan inflasi. Dari lapangan usaha, indikasi pemulihan masih jauh. Justru yang terjadi masih terlihat penurunan. Bisa kita lihat bahwa industri manufaktur terus melambat. Perannya terhadap PDB terus menurun di tengah kebutuhan penyerapan tenaga kerja yang lebih besar," tambahnya.

Untuk realisasi kluster pemulihan ekonomi yang mencapai Rp 183,4 triliun atau lebih dari 100%, dimana klaster ini juga meliputi dukungan

untuk UMKM termasuk subsidi KUR, wakil ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini mencatat dua hal.

Pertama, Anis mengatakan jangan hanya fokus pada nilai dan persentase realisasi anggaran tetapi juga perhatikan impact nya. Hal ini yang terus luput dari evaluasi anggaran kita. Hanya mencapai target realisasi (belanja) sedangkan kualitasnya jarang dikalkulasi.

"Jadi, pajak yang kita bayar dan pembiayaan dari utang bisa mubazir jika tidak dievaluasi penggunaan anggarannya," ungkapnya.

Kedua, dalam kaitannya dengan UMKM dan KUR, Anis menegaskan secara pribadi sangat mendukung realisasi anggaran yang besar dan tinggi. Akan tetapi, perlu dianalisis apakah penerimaan bantuan UMKM sudah merata atau hanya itu-itu saja. Persoalan mendasar di Indonesia adalah terkait data.

Selengkapnya kunjungi fraksidr.pks.id

"Saya melihat penyerapan anggaran PEN ini memang cukup rendah sejak 2020.

Dalam kaitannya dengan indikasi pemulihan ekonomi, kelihatan masih jauh dari kondisi sebelum pandemi Covid-19,"

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si
Anggota Komisi XI DPR RI

Wakil Ketua FPKS: Persoalan Dana Mengendap di Perbankan Daerah

Jakarta (23/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam menyoroti persoalan tingginya dana Pemda di perbankan daerah terus memunculkan polemik.

Kondisi tersebut, kata Ecky, menyebabkan ekonomi daerah sulit bergerak lebih cepat bahkan cenderung beraktivitas business as usual. Padahal, ekonomi daerah perlu dipacu agar pertumbuhan ekonomi nasional bisa lebih cepat.

Data Bank Indonesia (2022) dapat menunjukkan pergerakan dana Pemda di perbankan. Data tersebut mengonfirmasi bahwa sepanjang Januari-April (pada tahun tertentu Januari-Maret), posisi dana Pemda cenderung naik.

Dana tersebut mulai menurun pada Mei tetapi Juni hingga Juli posisi dana Pemda kembali meningkat. Sementara itu, Agustus posisi dana Pemda kembali menurun sedangkan September-November Pemda

cenderung naik. Penurunan dana Pemda yang signifikan terjadi pada Desember setiap tahunnya.

Bahkan, pada tahun-tahun tertentu, penurunan dana Pemda di perbankan pada Desember bisa 50 persen dari posisi bulan sebelumnya. Jika mengamati data tersebut maka belanja Pemda yang signifikan terjadi pada April/Mei, Juli/Agustus, dan November/Desember setiap tahunnya. Pola yang demikian sudah terjadi sejak lama.

Pada Januari hingga Maret 2022, misalnya, dana Pemda meningkat dari Rp163 triliun (Januari) menjadi Rp209 triliun (Maret). April 2022, posisi dana Pemda di perbankan mencapai Rp197 triliun yang turun sekitar

Rp11 triliun dibandingkan Maret 2022. Belanja Pemda pada 2022 lebih cepat dibandingkan 2021 yang baru terealisasi tinggi pada Mei.

Sementara itu posisi dana Pemda pada Mei-Juni pada 2022 masing-masing Rp207 triliun dan Rp229 triliun yang masing-masing naik 4,9 persen (mom) dan 10,4 persen (mom). Posisi dana Pemda kembali turun pada Juli.

Juli 2022, posisi dana Pemda di bank mencapai Rp199 triliun yang turun sekitar Rp29 triliun atau 12,9 persen (yoy). Posisi dana Pemda akhir tahun 2022 mencapai Rp123 triliun yang turun hampir sekitar 50 persen dari November 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pola belanja di akhir tahun masih terus terjadi.

Anggota Komisi XI ini memandang bahwa persoalan tingginya dana Pemda di perbankan memang telah menjadi bahasan hangat, bukan hanya saat ini tetapi juga sejak lama.

Akan tetapi, Ecky melihat bahwa persoalan tersebut tidak

murni menjadi ranah pemerintah daerah.

"Isu ini harus dibedah lebih dalam agar kita paham titik persoalannya dimana dan segera diselesaikan". Ungkap Ecky.

Aleg Dapil Jabar III tersebut merinci beberapa persoalan mendasar yang menjadi biangkerok tingginya dana Pemda di perbankan daerah. Pertama, saya melihat persoalan penting dari isu ini dimulai dari nomenklatur 'dana mengendap' yang belum tersedia.

"Yang paling lazim digunakan dalam anggaran adalah rata saldo harian dalam setahun. Meski demikian, pemerintah pusat terkadang menggunakan saldo per akhir bulan. Kondisi tersebut menyebabkan persepsi terhadap dana mengendap belum jelas," ungkapnya.

Pada bagian kedua, Ecky menyoroti masalah kecenderungan daerah menepatkan dana pada giro dan deposito untuk mendapatkan bunga.

"Tentu, bunga tersebut menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Sebagaimana diketahui, simpanan deposito tidak dapat dicairkan sebelum durasi simpanan berakhir. Hal tersebut menyebabkan dana Pemda cenderung naik," terang Ecky.

Selengkapnya kunjungi fraksidpr.pks.id

Pemerintah Pusat perlu memilah apakah dana mengendap ini adalah persoalan definisi ataukah memang terjadi masalah pada ketidakmampuan daerah dalam melakukan realisasi belanja.

H. ECKY AWAL MUCHARAM

Anggota Komisi XI DPR RI



Baleg FPKS: Penyusunan RUU Kesehatan Harus Cermat dan Libatkan Stakeholder Terkait

Jakarta (16/01) — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah menanggapi Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan yang mulai dibahas dalam rapat Baleg DPR RI dan mendapatkan respon dari berbagai organisasi kesehatan.

Menurut Ledia, penyusunan RUU Kesehatan ini harus lebih berhati-hati dan harus cermat serta jangan mengabaikan Undang-undang eksisting yang ada.

Hal tersebut diungkapkan Ledia dalam Konferensi Pers Terkait RUU Kesehatan yang dihadiri Perwakilan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidang Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia

(PDGI) dan Perwakilan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), di Media Centre DPR RI, Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin, (16/01).

"Fraksi PKS sejak awal mempertanyakan Bagaimana RUU ini akan disusun sebagai pengganti undang-undang yang lama atau ada sekitar sembilan Undang-undangan eksisting yang sudah ada. Apa evaluasi terhadap UU kesehatan lain? Road map seperti apa? Konstruksinya seperti apa?," ungkap Anggota Komisi X DPR

RI ini.

Ledia menambahkan dalam rapat pleno dan diskusi terkait dengan RUU Kesehatan ini, Baleg DPR sudah mengundang 26 stakeholder kesehatan.

"Sebaiknya desain konstruksi RUU ini dibincang dengan stakeholder bidang kesehatan juga. Kita harus melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Harus dengan komitmen semua pihak, jika tidak maka tidak akan menjadi lebih baik RUU Kesehatan ini ke depan," ujar Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini.



Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Anggota Badan Legislasi DPR RI

"Fraksi PKS sejak awal mempertanyakan Bagaimana RUU ini akan disusun sebagai pengganti undang-undang yang lama atau ada sekitar sembilan Undang-undangan eksisting yang sudah ada. Apa evaluasi terhadap UU kesehatan lain? Road map seperti apa? Konstruksinya seperti apa?,"



Live *Interactive*

Bersama
Anggota
Legislatif PKS



BERSAMA **ARI PUTRA UTAMA**



Saksikan
Setiap Jum'at
pk. 13.30 s.d 14.30 WIB



Aleg PKS Prihatin Maraknya Peredaran Rokok Ilegal dari Perkampungan ke Perkotaan di Jawa Barat

Jakarta (26/01) --- Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Bandung Jawa Barat pada Selasa (24/1/2023). Kunjungan ini dilakukan terkait Pengelolaan Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Barat. Turut serta dalam rombongan, Anis Byarwati, Wakil Ketua BAKN DPR RI.

Pada kesempatan ini, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati mencermati salah satu fakta lapangan yang ditemukan Dirjen Bea Cukai Jawa Barat terkait dengan maraknya peredaran rokok ilegal di Jawa Barat yang berkorelasi dengan daya beli masyarakat yang menurun.

"Daya beli masyarakat menurun, namun kebutuhan merokok tidak menurun. Akhirnya beralih ke rokok ilegal. Ini tantangan tersendiri," katanya.

Anggota Komisi XI DPR RI ini juga menyoroti tingginya penindakan cukai untuk rokok ilegal pada tahun 2022. Angka kenaikan penindakan cukai dari tahun 2021 ke tahun 2022, tercatat lebih dari 100%. Sehingga kerugian negara yang diakibatkannya juga sangat tinggi. Purwakarta sebagai produsen rokok, penindakannya hanya 1.088. Sementara Bandung mencapai 4.325.

"Ini menunjukkan adanya pergeseran yang tadinya rokok

ilegal itu maraknya di perkampungan kemudian bergeser ke perkotaan. Artinya orang-orang perkotaan mengalami daya beli yang menurun sampai rokok ilegal pun banyak di daerah perkotaan," tegas Anis.

Terkait dengan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT), ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyampaikan keluhan yang seringkali disampaikan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, yaitu tidak fleksibelnya penggunaan DBHCT.

Bagi daerah yang banyak petani tembakau didaerahnya,

kenaikan DBHCT tidak berpengaruh kepada kesejahteraan petani tembakau. Prosentase pembagian DBHCT yang berlaku selama ini adalah 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 40% untuk kesehatan dan 10% untuk penegakan hukum.

"Petani tembakaunya sendiri tidak terpengaruh secara signifikan dengan adanya kenaikan DBHCT. Sehingga kesejahteraan petani tembakau tidak ikut naik," tutur Anis.

Terakhir, Anis mengingatkan agar Dirjen Bea Cukai tidak hanya fokus pada penindakan tapi perlu ada upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir rokok ilegal.

"Adanya penindakan ternyata tidak menurunkan produksi rokok. Bahkan produksi rokok ilegal terus meningkat. Berarti demandnya memang ada dan bahkan sudah kearah perkotaan. Penindakan perlu dibarengi dengan upaya edukasi kepada masyarakat," tutupnya.

"Daya beli masyarakat menurun, namun kebutuhan merokok tidak menurun. Akhirnya beralih ke rokok ilegal. Ini tantangan tersendiri

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si

Wakil Ketua BAKN DPR RI



Hadiri HUT Media Lokal Aceh,

Nasir Djamil: Jiwa Jurnalis Jangan Hilang karena Kemudahan Teknologi



Banda Aceh (20/01) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, M. Nasir Djamil mengisi kegiatan Sejam Bersama Nasir Djamil yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka HUT ke-18 Hariar Rakyat Aceh pada Selasa, 17 Januari 2023.

Dalam kesempatan itu, Nasir berdiskusi langsung dengan peserta yang hadir dan membicarakan tema diskusi mengenai bekerja di media masa kini yang penuh dengan tantangan dan tekanan sosial ang tinggi.

Menurutnya, media harus mengemas konten-konten yang menarik dengan mengedepankan bagaimana media hadir dan bisa mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih baik kedepan. Era apapun konflik di masyarakat harus bisa diturunkan melalui pemberitaan media.

"Mau tidak mau kita memasuki Era baru. Tapi jiwa Jurnalis jangan hilang hanya karena kemudahan teknologi saat ini. Semua harus dilakukan dengan bergerak dalam mencari berita," kata Nasir Djamil pada gelaran tersebut.

Dijelaskannya, koran-koran yang mempunyai nilai 'sejarah' kiranya jangan padam di era globalisasi. Dicontohkannya Koran Republika yang per 1

Januari tutup dengan kondisi perjuangan yang panjang. Era Baru mengurus manajemen media Koran saat ini.

Era digital mengerus, media massa sangat berperan memengaruhi pola pikiran. Interaksi sosial harus dibangun melalui media. Media

mempunyai peran penting pada masa orde baru dimana mengharuskan Surat Ijin Penerbitan Pers (SIUP) Orde baru mengendalikan media saat itu.

Saat reformasi baru ada kehidupan baru media. Dengan dihilangkannya SIUP. Kebebasan berpendapat mendapat ruang yang luas. Perubahan di era baru, bagaimana Koran Hariar Rakyat Aceh harus mengambil peran untuk pembaca.

"Informasi semakin mudah, wartawan Hariar Rakyat Aceh harus lebih giat menjalankan aktivitas sebagai wartawan." kata Nasir dihadapan para wartawan Hariar Rakyat Aceh.

"Media harus mengemas konten-konten yang menarik dengan mengedepankan bagaimana media hadir dan bisa mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih baik kedepan. Era apapun konflik di masyarakat harus bisa diturunkan melalui pemberitaan media. Mau tidak mau kita memasuki Era baru. Tapi jiwa Jurnalis jangan hilang hanya karena kemudahan teknologi saat ini. Semua harus dilakukan dengan bergerak dalam mencari berita

H.M. NASIR DJAMIL, M.Si

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Nangroe Aceh Darussalam II



Syaikh Kunjungi Rumah Aspirasi Asyik di Purwakarta



Rumah Aspirasi Ahmad Syaikh (Asyik) merupakan salah satu program yang didirikan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikh untuk bisa menghadirkan beragam manfaat untuk masyarakat.

Purwakarta (25/01) — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Ahmad Syaikh berkesempatan mengunjungi Rumah Aspirasi Asyik dalam rangkaian Kunjungan Kerja kerja ke Purwakarta, Kamis (22/12/2022).

Rumah Aspirasi Ahmad Syaikh (Asyik) merupakan salah satu program yang didirikan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikh untuk bisa menghadirkan beragam manfaat untuk masyarakat.

"Saat reses, saya berkunjung ke Rumah Aspirasi Asyik. Di sini, saya bertemu dengan tokoh masyarakat setempat. Berdialog dan mendengarkan aspirasi

mereka," ucap Syaikh.

"Saya sampaikan bahwa keberadaan Rumah Aspirasi Asyik ini harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta. Perlu terus dihidupkan dengan berbagai kegiatan positif. Tak perlu ragu untuk datang dan menyampaikan masalah lingkungan. Se jauh bisa

dibantu, insya Allah akan coba diberikan solusinya sesuai kemampuan," lanjutnya.

Salah seorang warga bernama Zaenal mengaku keberadaan Rumah Aspirasi Asyik sangat membantu dan kehadirannya sangat membantu masyarakat sekitar.

"Terima kasih pak Ahmad Syaikh, kebetulan rumah saya dijadikan markas rumah aspirasi Asyik, dimana banyak warga terganti melalui program ini," kata Zaenal.

Kunjungan Syaikh dalam rangka agenda reses yang berlangsung dari 21-29 Desember 2022. Selain di Purwakarta, Syaikh juga mengunjungi Kabupaten Bekasi dan Karawang.

"Saya sampaikan bahwa keberadaan Rumah Aspirasi Asyik ini harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta. Perlu terus dihidupkan dengan berbagai kegiatan positif. Tak perlu ragu untuk datang dan menyampaikan masalah lingkungan. Se jauh bisa dibantu, insya Allah akan coba diberikan solusinya sesuai kemampuan,"

H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VII





Hj. Diah Nurwitasari, M. I. POL Resmikan MCK di Tiga Kecamatan



Bandung (25/01) — Anggota Komisi VII DPR-RI dari Fraksi PKS, Diah Nurwitasari, meresmikan bantuan pembangunan MCK di Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.

Sebanyak 8 unit MCK dibangun atas Sinergi Bantuan SKK Migas dan Anggota Komisi VII DPR-RI, setiap unit terdiri dari 1 toilet dan 1 kamar mandi.

Penempatannya sesuai dengan permintaan masyarakat, yang tersebar di Kecamatan Bojongsoang, Ciparay dan Nagreg.

Dalam sambutannya Diah Nurwitasari mengucapkan terima kasih kepada SKK Migas yang telah mengulirkan program bantuan ini.

"Terima kasih kepada SKK Migas yang telah bekerja sama dengan kami Komisi VII DPR-RI membangun beberapa unit MCK bagi masyarakat Kabupaten Bandung," ucap Wakil Rakyat Dapil Kabupaten Bandung dan KBB ini.

Penyebaran pembangunan MCK ini cukup beragam, 8 set MCK ini kami sebar di beberapa titik 2 di fasilitas belajar mengajar, 2 untuk masjid, 3 di pemukiman warga, dan 1 di area desa wisata.

"Kami harap MCK yang dibangun ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, dan masyarakat yang menerima manfaat dari

pembangunan ini mampu memeliharanya dengan baik agar kebermanfaatannya bisa dirasakan lebih lama." Pungkas Diah menyampaikan harapannya.

Adapun Syafe'i Syafri sebagai Senior Manager Hubungan Kelembagaan SKK Migas pada kesempatan itu memperkenalkan SKK Migas kepada audien.

"SKK Migas adalah Satuan Kerja Khusus yang dibentuk pemerintah sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Jadi

kami yang bertanggungjawab mengeksplorasi dan mengeksplotasi sumber daya migas yg ada di bumi Indonesia ini." Tutur pejabat SKK Migas ini.

"Kemampuan produksi BBM kita hanya 600 ribu barel perhari, sedangkan kebutuhan nasional kita mencapai 1,4 juta barel seharinya. Oleh karena itu mari kita bersama-sama menghemat energi terutama BBM ini." tutup pejabat mitra Komisi VII ini.

Tampak hadir dalam acara tersebut beberapa tokoh masyarakat dari unsur TNI Polri dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, Sari Sundari. Acara ini pun ditutup dengan pemberian ratusan paket sembako kepada warga yang turut hadir.

"Kami harap MCK yang dibangun ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, dan masyarakat yang menerima manfaat dari pembangunan ini mampu memeliharanya dengan baik agar kebermanfaatannya bisa dirasakan lebih lama."

Dipl.Ing. Hj. **DIAH NURWITASARI**, M. I. POL.
Anggota Komisi VII DPR RI

DPC PKS KEC. AMPEK ANGKEK



Peresmian RKI Lambah

Nevi Zuairina Sampaikan Kondisi Dinamis Bentuk Keluarga Kokoh

Kabupaten Agam (25/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sumatera Barat, Nevi Zuairina meresmikan Rumah Keluarga Indonesia (RKI) di Lambah Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

Dalam kesempatan tersebut, Nevi menyampaikan pentingnya wadah pembekalan, pelatihan, pembinaan, bagi keluarga yang bergabung sebagai anggota PKS.

Nevi mengatakan, RKI inilah wadah untuk membentuk keluarga yang kokoh, mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki untuk hidup mandiri, berdaya, harmonis sejahtera serta melindungi keluarga dari berbagai masalah yang dihadapi.

“RKI merupakan program unggulan PKS melalui bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga. RKI juga sebagai sarana pembekalan, pembinaan, dan pelatihan anggota PKS dan masyarakat umum untuk mewujudkan ketahanan keluarga Indonesia

yang berkualitas,” tutur Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menjelaskan, ada beberapa program RKI yang sangat bermanfaat bagi keluarga Indonesia terutama bagi anggota PKS diantaranya : Pembekalan pra nikah, Harmonisasi Pasutri, Parenting, Club Ayah, Sahabat Ibu dan Anak, Program Lansia, Pos Ekonomi Keluarga (Pos Eka), Ketahanan Pangan Keluarga, Konsultan Keluarga dan Layanan Konsultasi Keluarga.

Peresmian RKI ini menurut Nevi, lebih berkualitas dikarenakan ada nasehat dari pakar yang menyampaikan pelibatan ALLAH untuk hadirkan surga di dalam rumah tangga.

“Alhamdulillah perangkat struktur PKS lengkap menghadiri peresmian RKI di Agam ini, mulai ketua DPD PKS Agam, Ketua BPKK PKS Agam, Ketua DPC PKS Ampek Angkek dan Ketua Ranting PKS Nagari Lambah. Semoga PKS Agam tetap Kompak dan Solid, mewujudkan tujuan utama PKS berkhidmat melayani rakyat, salah satunya melalui RKI yang sudah terbentuk hingga tingkat kelurahan atau nagari,” tutup Nevi Zuairina.

“RKI merupakan program unggulan PKS melalui bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga. RKI juga sebagai sarana pembekalan, pembinaan, dan pelatihan anggota PKS dan masyarakat umum untuk mewujudkan ketahanan keluarga Indonesia yang berkualitas,”



Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II



Bersama Mitra BUMN, Rafli Resmikan Kawasan Konservasi dan Ekowisata di Pulau Breuh



Banda Aceh (20/01) — Kesungguhan masyarakat di Pulau Breuh Kabupaten Aceh Besar membangun kawasan konservasi dan ekowisata Pasi Weung, melalui Badan Usaha Milik Gampong Bersama (BUMDESMA) Maju Besare mengundang perhatian anggota Komisi VI DPR RI Rafli sehingga mengarahkan Program Kemitraan Bina Lingkungan PT. PLN turut serta memabangun kawasan tersebut.

Program yang dibuat di setiap daerah, imbuhan Rafli, harus melibatkan masyarakat setempat.

"Seperti di Pulau Breuh ini, terus dengan grand desain sedemikian rupa, kemanfaatan diharapkan berkelanjutan," ungkap Anggota Komisi VI DPR RI ini.

Kesempatan Soft Launching pada Pagi Rabu (18/01/2023) tersebut, Rafli juga mengingatkan agar setiap pembangunan fisik melibatkan masyarakat setempat secara langsung dan berdasarkan kajian lokal

Sementara itu, menurut tokoh masyarakat setempat, Muhammad Isa mengatakan pembangunan kawasan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.

"Kawasan konservasi

fasilitas dan hal berkaitan dengan kawasan konservasi Pasi Weung sedang terus kita upayakan realisasinya, diantaranya saat ini dengan bantuan CSR PT. PLN melalui anggota DPR RI Bapak Rafli," jelas Isa.

Hadir pada soft launching kawasan konservasi dan ekowisata milik BUMG Bersama Pulo Breuh Maju Beusare itu, Anggota DPR RI Fraksi PKS asal Aceh Rafli, perwakilan PLN, ASDP, BPKS, Kepala DPMG Aceh Besar dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pariwisata Aceh Besar, Camat Pulau Aceh, Kapolsek Pulau Aceh, Danramil Pulau Aceh, Mukim, Para Kades serta masyarakat setempat.

dipandang penting untuk penyelamatan kawasan hutan lindung, di wilayah gampong Pulo Breuh," ungkapnya.

"Sejumlah kebutuhan

"Program yang dibuat di setiap daerah, harus melibatkan masyarakat setempat. Seperti di Pulau Breuh ini, terus dengan grand desain sedemikian rupa, kemanfaatan diharapkan berkelanjutan

RAFLI

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Nanggroe Aceh Darussalam I



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kreatif Abrahik Substantif



Selamat & Sukses SATU ABAD NU 1344 H - 1444 H

Mendigdayakan NU
Menjemput Abad Kedua
Menuju Kebangkitan Baru

**Hj. Ledia Hanifa A,
S.Si., M.Psi.T**
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



Nur Azizah Tamhid Senang Hasil dari Bank Sampah Cimanggis Depok Disumbangkan ke Anak Yatim



Depok (19/01) — Anggota DPR Komisi VIII Nur Azizah Tamhid mengunjungi Sedekah Bank Sampah di Taman Baca Melego, RT 02/RW 09, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, pada Sabtu (7/1/2022).

Kunjungan ini dilakukan untuk melihat aktivitas pemilahan sampah yang dilakukan oleh warga Kelurahan Tugu.

"Saya datang untuk mengapresiasi kegiatan pemilahan sampah yang sudah berjalan enam bulan ini," kata Nur Azizah di Taman Baca Melego, Tugu, Cimanggis, Sabtu (7/1/2023).

Dia memuji aktivitas bank sampah di RT 02/RW 09 ini karena hasilnya disumbangkan untuk menyantuni anak yatim.

Dalam kesempatan ini, Nur Azizah Tamhid memberikan sedikit bantuan untuk pembuatan tenda di lokasi pemilahan sampah.

"Saya mendukung kegiatan ini dengan memberikan sedikit bantuan untuk pembuatan tenda," paparnya.

Dia berharap kegiatan pemilahan sampah ini bisa menjadi contoh bagi RT/RW lain di Kota Depok.

"Semoga kegiatan Sedekah Bank Sampah ini bisa menjadi inspirasi bagi RT/RW lain di Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis dan Kota

09, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, pada Sabtu (7/1/2022).

Kunjungan ini dilakukan untuk melihat aktivitas pemilahan sampah yang dilakukan oleh warga Kelurahan Tugu.

"Saya datang untuk mengapresiasi kegiatan pemilahan sampah yang sudah berjalan enam bulan ini," kata Nur Azizah di Taman Baca Melego, Tugu, Cimanggis, Sabtu (7/1/2023).

Depok," tandas Nur Azizah.

Anggota DPR Komisi VIII Nur Azizah Tamhid mengunjungi Sedekah Bank Sampah di Taman Baca Melego, RT 02/RW



"Saya mendukung kegiatan ini dengan memberikan sedikit bantuan untuk pembuatan tenda, Semoga kegiatan Sedekah Bank Sampah ini bisa menjadi inspirasi bagi RT/RW lain di Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis dan Kota Depok,"

Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.
Anggota Komisi VIII DPR RI



Mudahkan Warga Akses Lapangan Pekerjaan, Alifudin Resmikan BLK Komunitas di Pontianak



Pontianak (18/01) — Anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi PKS, Alifudin meresmikan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Yayasan Al-mumtaz Pontianak, di jalan Dr Wahidin, Pontianak, Sabtu (14/01/2023).

Acara peresmian BLK Komunitas ini dihadiri oleh, Ismail Arahman, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Pontianak, Ketua Yayasan Al Mumtaz, Abdul Rahmi serta tokoh masyarakat sekitar lokasi BLK.

Program BLK Komunitas adalah salah satu program Pemerintah, dari kementerian Ketenagakerjaan yang merupakan mitra kerja Komisi IX DPR RI, tujuan dari program ini dalam rangka upaya pemerintah meningkatkan sebaran lembaga pelatihan kerja, bagi masyarakat atau komunitas agar lebih mudah mengakses tempat latihan kerja.

"Dengan adanya BLK Komunitas Multimedia di Yayasan Al Mumtaz, mudah2an ada BLK Komunitas bidang lain seperti Menjahit, Tata boga dan lain sebagainya pada tahun ini dan diharapkan masyarakat memiliki ketrampilan yang mampu terserap oleh dunia usaha dan industri kedepannya," jelas Alifudin.

Kerjasama yang kuat antar pihak pemerintah, swasta dan

akademisi dalam pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan SDM sangat perlu dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi alumni BLK Komunitas yang kesulitan terserap dunia usaha dan industri.

"Banyak juga alumni BLK Komunitas yang memutuskan untuk menjadi wirasahawan, meskipun mereka terkendala dengan akses permodalan. Untuk itu kedepannya BLK Komunitas perlu melibatkan Dunia Usaha Dunia Industri

(DUDI) mulai dari proses pelatihan sehingga setelah selesai pelatihan, alumni BLK komunitas dapat disalurkan langsung," tambah Alifudin, yang biasa disapa Bang Alif.

Alifudin juga berharap adanya pendampingan kepada alumni agar mudah mendapatkan akses permodalan, sehingga alumni BLK Komunitas mampu mengembangkan usahanya.

"Kami sebagai Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Dapil Kalbar 1 selalu mendukung kebijakan anggaran, legislasi dan mengawasi program2 Kementerian Ketenagakerjaan khususnya wilayah Disnaker Kota Pontianak demi membangun SDM-SDM yang punya integritas dan kemampuan yang bisa bersaing di era globalisasi," pungkasnya.

"Dengan adanya BLK Komunitas Multimedia di Yayasan Al Mumtaz, mudah2an ada BLK Komunitas bidang lain seperti Menjahit, Tata boga dan lain sebagainya pada tahun ini dan diharapkan masyarakat memiliki ketrampilan yang mampu terserap oleh dunia usaha dan industri kedepannya

H. ALIFUDIN, S.E., M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Barat I



Lakukan Kunjungan Literasi ke Rumah Peradaban Al Fatih Pasaman Barat



Pasaman Barat (21/01) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sumatera Barat, Nevi Zuairina melakukan kunjungan literasi ke Rumah Peradaban di lembaga pendidikan Al Fatih Kapa Timur Pasaman Barat.

Kunjungan dilakukan dalam rangka bagian dari jemput bola aspirasi masyarakat dalam kerja anggota legislatif di tahun 2023.

Nevi mengatakan, Kunjungan Literasi merupakan salah satu program turba oleh Legislator. Bundo Nevi yang juga akrab disapa dengan Ummi Nevi di daerah pemilihannya Sumatera Barat II, dengan tujuan menggalang masukan, saran, dan pendapat serta dialog yang membangun di berbagai sektor termasuk pendidikan dan keagamaan, ia sangat mendukung terhadap Program Gerakan Literasi Nasional.

"Saat ini, kita telah memiliki segala macam sumber daya alam untuk kita kelola dengan baik. Namun, dimasa depan, yang kita perlukan adalah kekuatan literasi agar generasi kita sangat mumpuni dalam berfikir, menggagas, berkreasi dalam mengelola potensi sumber daya Indonesia yang sangat besar dibandingkan dengan negara-negara dunia. Potensi Laut dan daratan kita, sangat unik membentang sepanjang garis

khatulistiwa," ungkap Nevi dalam sambutannya.

Kedatangan Nevi ke Rumah Peradaban AlFatih yang berlokasi di Kapa Timur Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Pasaman Barat tersebut disambut Wali Nagari Kapa Edi Hartono, Ketua dan segenap anggota Forum Pegiat Literasi (FPL) Pasaman Barat, Forum TBM Pasaman Barat, anak-anak Rumah Peradaban Al Fatih dan masyarakat di lingkungannya.

Nevi yang didampingi rombongan antara lain tokoh pendidikan Pasaman Barat Ummi Yunesli Ketua Yayasan Ainurrahmah beserta angkatan muda PKS memanfaatkan waktu yang terasa singkat dengan gembira. Dalam kesempatan tersebut, Ummi Nevi menyampaikan penjelasan terkait maksud dan tujuan kunjungan literasi yang ia lakukan. Disampaikannya pula peluang dan kesempatan sokongan materi dan fasilitas non materi kepada gerakan kemelekan literasi sebagaimana yang dilakukan oleh Forum Pegiat Literasi Pasaman Barat.

Selengkapnya kunjungi fraksidpr.pks.id

"Saat ini, kita telah memiliki segala macam sumber daya alam untuk kita kelola dengan baik. Namun, dimasa depan, yang kita perlukan adalah kekuatan literasi agar generasi kita sangat mumpuni dalam berfikir, menggagas, berkreasi dalam mengelola potensi sumber daya Indonesia yang sangat besar dibandingkan dengan negara-negara dunia

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II



Andi Akmal Dorong Terbentuknya kelompok Tani Sambil Berikan Bantuan



KUTIPAN

Kabupaten Bone (16/01) --- Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Dapil Sulsel II, Andi Akmal Pasluddin di daerah pemilihannya, memberikan sejumlah ragam bantuan kepada kelompok tani.

Bantuan ini diberikan kepada berbagai kelompok tani berupa bibit jagung, bibit bawang merah dan cultivator.

"Pemberian bantuan ini merupakan simbol bahwa petani Bone siap untuk mensukseskan program ketahanan pangan. Dimulai dari kesesuaian lahan dan iklim yang ada di Bone, berupa jagung dan bawang merah, sehingga produksinya dapat maksimal," ungkap Akmal.

Pria yang kerap disapa AAP di daerah pemilihannya sebagai anggota DPR RI ini mengatakan, bahwa setiap tindakannya ketika turun ke bawah membawa program pemerintah pusat, ia selalu berkoordinasi baik kepada pemerintah daerah maupun dengan team yang ia telah bangun sejak ia masih menjadi pimpinan DPRD propinsi.

Ia menambahkan, dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah, bantuan-bantuan ini diharapkan tepat sasaran, karena database lengkap ada di dinas-dinas. Namun demikian, ia

menyarankan kepada para petani yang belum memiliki kelompok, agar dapat segera membentuk organisasi tingkat petani yang kemudian didaftarkan kepada dinas kabupaten.

"Saya melihat masih banyak petani yang belum tergabung dalam kelompok sehingga tidak

memiliki kesempatan untuk mendapat bantuan. Team Kami yang tergabung dalam relawan AAP akan selalu menyarankan pada para petani untuk berorganisasi, berkelompok dan terdaftar secara resmi di dinas agar mendapat kesempatan yang sama dengan kelompok-kelompok tani yang terbentuk selama ini," urai Akmal dalam sambutannya.

Politisi PKS ini menegaskan, agar pemerintah juga ikut aktif dalam membangun organisasi petani berupa kelompok-kelompok, serta memberikan pembinaan-pembinaan.

"Pencabutan aturan PPKM oleh pemerintah beberapa waktu lalu akan menjadi pijakan tambahan bagi tumbuh dan bergeraknya ekonomi. Di bidang transportasi udara, penghapusan kebijakan pembatasan tersebut akan menambah daya dorong recovery kinerja industri penerbangan."

**Dr. H. ANDI AKMAL
PASLUDDIN, S.P.,M.M**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II



Rofik Resmikan Jalan Baru dan Bantuan Lainnya untuk Warga Desa Kedungjati

Purbalingga (16/01) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Rofik Hananto meresmikan pembangunan jalan baru

yang merupakan program aspirasi di wilayah RT 03 RW 02 Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja, Ahad (15/01/2023).

Acara peresmian tersebut dibalut dalam acara senam pagi bertajuk 'Senam Go PKS Go Bersama Rofik Hananto', yang diikuti oleh berbagai elemen warga Desa Kedungjati, baik

bapak-bapak, ibu-ibu, hingga remaja dan anak kecil.

Selain meresmikan jalan baru, Rofik juga meresmikan hasil bantuan aspirasinya bagi warga Desa Kedungjati berupa BPBL (Bantu Pasang Baru Listrik), Konverter Kit Pompa Air untuk petani, hingga bantuan untuk sarpras sekolah serta

biskuit gratis bagi Balita.

Melalui sambutannya, Rofik mengucapkan terima kasih karena sudah meramaikan acara tersebut. Melalui acara tersebut, Rofik mengatakan senang melihat masyarakat dapat menikmati hasil aspirasinya.

"Hari ini sangat berkesan bagi saya dengan selesainya pengaspalan jalan ini. Ini membuat saya semakin semangat mencari anggaran untuk masyarakat. Karena kalau membantu masyarakat itu menyenangkan. Bantuan tidak seberapa tetapi ada swadaya dan sengkuyung masyarakat yang membuat semangat," tutur Anggota DPR RI Komisi VII tersebut.

Menurutnya, melalui pembangunan jalan baru ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menunjang kegiatan masyarakat sehari-hari.

"Kalau jalannya sudah bagus juga tidak hanya indah tapi hidup jd nyaman, kemana-mana enak, makin semangat," imbuh Rofik.

Rofik juga menyebutkan hasil aspirasi lainnya yang dapat diberikan kepada warga Desa Kedungjati, yakni BPBL dan Konkrit.

"Kita tahun ini mengajukan (BPBL) paling banyak se-Indonesia lagi, mengajukan 18 ribu di Dapil (Jateng) 7. Kita juga sudah 2 ribuan lebih (Konkrit) termasuk di Purbalingga ini,

semoga tahun ini, bisa mengaspirasikan lebih banyak lagi," terangnya.

Terakhir, Rofik juga menekankan perannya menjadi wakil rakyat di DPR RI, yakni untuk memperjuangkan Dapilnya termasuk desa-desa yang sudah mendukungnya.

"Tugas saya sejak dilantik yaitu memperjuangkan Dapil, jadi fokus saya (sejak dilantik) itu memperjuangkan Dapil saya

Dapil Jateng 7, dan desa yang harus saya perjuangkan adalah Desa Kedungjati," tutupnya.

Hadir juga memberikan sambutan yaitu Kepala Desa Kedungjati Suwondo, dimana beliau menyampaikan terima kasih atas perwujudan aspirasi-aspirasi yang telah diajukan sebelumnya.

Selengkapnya kunjungi fraksidpr.pks.id



H. ROFIK HANANTO, S.E.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

"Melalui pembangunan jalan baru ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menunjang kegiatan masyarakat sehari-hari. Kalau jalannya sudah bagus juga tidak hanya indah tapi hidup jd nyaman, kemana-mana enak, makin semangat,"



Sambangi Korban Kebakaran

Iskan Beri Bantuan Advokasi sebagai Wakil Rakyat

Labuhan Batu Utara (16/01) — Anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis (IQL) mendatangi para korban kebakaran,

yang melenyapkan 16 rumah sekaligus di perkampungan nelayan di Desa Simandulang, Kualuh Leidong, Labuhan Batu Utara (Labura).

Kedatangan IQL kali ini adalah untuk memberikan bantuan secara materiil dan moril bagi para korban serta

melihat langsung kondisi rumah – rumah yang telah terbakar oleh si jago merah pada tiga hari lalu. Bantuan tersebut merupakan hasil advokasi Iskan sebagai Wakil Rakyat.

Anggota DPR RI Dapil Sumut II ini mengatakan bahwa bantuan ini merupakan bentuk

kepedulian wakil rakyat kepada rakyatnya yang terkena musibah, terkhusus kebakaran yang terjadi di Desa Simandulang ini.

“Saya hadir disini karena saya peduli dengan bapak dan ibu semua, Perjalanan lebih kurang 10 jam untuk kesini. Namun, inilah bentuk tanggung jawab sosial saya selaku anggota dewan dan harus banyak berbuat untuk seluruh konstituen saya di Dapil Sumut II ini,” ucap Iskan disela-sela sambutannya.

Bantuan yang diberikan oleh Iskan hasil dari advokasi dengan Kemensos ini sebesar 125 juta rupiah yang terdiri dari 16 paket alat dapur, 16 paket family kit, 16 paket tenda gulung, 30 buah Kasur, 33 paket makanan anak, 130 paket makanan siap saji, dan juga 65 paket selimut dan diterima langsung oleh Kepala Desa Simandulang.

Dalam penyerahan bantuan bagi para korban kebakaran ini turut hadir Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labura, Jhon Ferri, yang menyatakan bahwa kehadiran IQL merupakan bentuk kepedulian beliau terhadap daerah konstituennya dan juga merupakan satu – satunya anggota DPR RI yang langsung turun membantu korban kebakaran di Desa Simandulang. Dan juga turut hadir perwakilan dari direktorat PSKBS Kemensos, Ibnu Solihin,

dan juga dari DPD PKS Kabupaten Labura dalam penyerahan bantuan ini.

Dikesempatan ini juga Iskan menyebutkan akan memberikan bantuan darurat untuk para korban kebakaran dan akan mengusahakan membangun rumah – rumah para korban kebakaran ini.

“Doakan dan mari kita

bekerja keras untuk bisa menyiapkan segala sesuatunya, baik adminstrasi, dan lain-lain. Agar sama-sama kita urus nanti pembangunan rumah bapak dan ibu kembali seperti sedia kala. Supaya bapak dan ibu semua bisa nyaman melaksanakan aktivitas setiap hari, termasuk beribadah dan beristirahat.” ungkap Iskan



“Saya hadir disini karena saya peduli dengan bapak dan ibu semua, Perjalanan-an lebih kurang 10 jam untuk kesini. Namun, inilah bentuk tanggung jawab sosial saya selaku anggota dewan dan harus banyak berbuat untuk seluruh konstituen saya di Dapil Sumut II ini,

H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Utara II



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Salurkan **ASPIRASI ANDA** **DI HARI ASPIRASI** **FRAKSI PKS DPR RI**

Kegiatan Aspirasi dilaksanakan
setiap Selasa dan Jum'at.

Ajuan Aspirasi

Isi via website form : <https://fraksi.pks.id/form-aspirasi-2/>



Terima Aspirasi Kasus KM 50

FPSK DPR: Kami akan Kawal dan Perjuangkan Keadilan bagi Korban!



Jakarta (16/01) -- Fraksi PKS DPR RI menerima audiensi dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan keluarga korban penembakan KM 50 di Ruang Meeting Fraksi PKS DPR RI, pada Senin (16/01/2023).

Kedatangan kuasa hukum dan keluarga korban KM 50 ini bermaksud untuk meminta bantuan Fraksi PKS DPR RI guna menuntut keadilan atas peristiwa pembunuhan terhadap anggota keluarga mereka di KM 50 Jalan Tol Cikampek.

Menurut keluarga korban, sangat banyak fakta yang tak diungkap dan ditutupi dalam proses pengusutan kasus KM 50. Selain itu, kuasa hukum keluarga korban KM 50 meminta agar kasus ini dikategorikan dan diusut sebagai pelanggaran HAM berat.

Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi berjanji akan terus memperjuangkan keadilan bagi keluarga korban KM 50.

"Kami terus bersama umat, khususnya dalam mengawal peristiwa KM 50 ini. Kita ingin menegakkan keadilan dari peristiwa KM 50 ini. Sebagai wakil rakyat, Fraksi PKS akan bersuara dalam

mengusut kasus ini InsyaAllah", tegas Habib Aboe.

Menurutnya, selama ini, Fraksi PKS telah menyampaikan permohonan kepada Komisi III agar kasus KM 50 dapat terus diusut dan ditindaklanjuti.

Namun, belum ada tanggapan.

"Seiring berjalannya waktu,



"Fraksi PKS akan segera berkirin surat ke Komnas HAM. Saya yang akan mendatanganinya. Kami pastikan akan terus berikhtiar sesuai dengan kemampuan dan kewenangan kami

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

fakta-fakta kasus ini makin terbongkar. Saya sudah sampaikan ke Komisi III, tetapi memang belum disambut oleh anggota-anggota lain. Kami berjanji akan memfollow-up aspirasi dari keluarga korban", terang pria yang akrab disapa Habib Aboe tersebut.

Habib Aboe pun meminta agar keluarga korban bersabar dan terus berjuang bersama dalam menuntut keadilan.

"Perjuangan ini tampaknya memerlukan waktu panjang. Tidak mudah. Semoga keluarga korban terus bersabar, dan kami akan berikhtiar bersama keluarga korban", ungkap Sekretaris Jenderal DPP PKS itu

Selengkapnya kunjungi fraksidr.pks.id





Aspirasi Emak-Emak Bergerak Lintas Provinsi, Mardani: PKS Siap Suarakan Keresahan Rakyat!



Jakarta (17/01) — Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menerima audiensi dari Barisan Emak-Emak Bergerak Lintas Provinsi di Ruang Meeting Fraksi PKS DPR RI, Senayan, pada Selasa (17/01).

Menurut para emak-emak, terdapat sangat banyak persoalan bangsa dan krisis multidimensi yang telah gagal diselesaikan oleh Pemerintah, mulai dari penanganan pandemi Covid-19, janji-janji kampanye yang tak terlaksana, penegakan hukum yang tebang pilih dan gagal melindungi rakyat, sekaligus banyak disahkannya peraturan yang dinilai merugikan masyarakat.

Menanggapi hal-hal tersebut, Mardani menyebut bahwa aspirasi rakyat adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan Fraksi PKS.

"Fraksi PKS mendengar banyak keluhan, aspirasi, dan jeritan masyarakat bahwa banyak hal yang tak sesuai dengan amanat konstitusi dan UUD 1945. Tentu, hal ini terus

kami suarakan dan perjuangkan di parlemen, termasuk meminta Pemerintah untuk fokus dalam melayani rakyat", ujar Mardani.

Lebih lanjut, Mardani meminta kepada para emak-emak yang hadir untuk terus mendukung PKS dalam memperjuangkan amanah rakyat.

"Jumlah kursi PKS di parlemen masih sedikit. Selain

itu, saat ini, PKS berada di luar pemerintahan. Oleh sebab itu, dimohon dukungan emak-emak untuk menyebarluaskan kinerja dan sikap PKS yang pro-rakyat agar lebih nyaring terdengar di masyarakat", ungkap Mardani.

Terakhir, Mardani berpesan agar para emak-emak tetap semangat dan giat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

"Sebagai bagian dari rakyat yang mencintai negara ini, tentu menjadi tugas kita, setiap warga negara untuk mengawasi kinerja Pemerintah. Semangat emak-emak sangat kami apresiasi dan semoga terus konsisten dalam memperjuangkan isu-isu kerakyatan yang dekat dengan kehidupan kita", pungkasnya.

"Fraksi PKS mendengar banyak keluhan, aspirasi, dan jeritan masyarakat bahwa banyak hal yang tak sesuai dengan amanat konstitusi dan UUD 1945. Tentu, hal ini terus kami suarakan dan perjuangkan di parlemen, termasuk meminta Pemerintah untuk fokus dalam melayani rakyat",

Dr. H. MARDANI, M.Eng

Anggota Komisi II DPR RI





Terima Kunjungan dari Mardani
Leadership School (MLS),

Syahrul Aidi Ajak Pelajar Jadi Orang Bermanfaat

Jakarta (24/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera dan Syahrul Aidi Maazat menerima kunjungan Pembelajaran Politik dari puluhan siswa-siswi Mardani Leadership School (MLS) di ruang Rapat Fraksi PKS DPR RI, Jakarta, (24/01).

Pimpinan Rombongan Mardani Leadership School (MLS), Muhammad Satiri mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Fraksi PKS DPR RI.

"Sebelumnya, yang pertama, kami mengucapkan terimakasih atas penerimaan dari Fraksi PKS. Yang kedua, agar anak-anak yang hadir ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan yang lebih utama adalah agar anak-anak nantinya bisa menjadi pemimpin bangsa di masa mendatang," ujar Satiri.

Anggota Komisi V DPR RI,

Syahrul Aidi Maazat mengatakan siang ini sangat berbahagia bisa bertemu para pelajar dari Mardani Leadership School karena belum tentu pelajar lain bisa ke gedung DPR.

"Saya seusia kalian tidak pernah ke gedung DPR ini. Jadi kalian harus sangat bersyukur sudah bisa ke gedung DPR ini.

Salah satu cara bersyukur adalah dengan memiliki cita-cita dari saat ini. Maka cita-cita terbesar yang harus dimiliki kalian adalah menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain," ujar Syahrul.

Maka, imbuhnya, mau ada dimana kita yang terpenting adalah bisa memberikan kemaslahatan bagi banyak orang.

"Mau jadi dokter, perawat atau Presiden sekalipun yang penting kebermanfaatan itu yang paling utama. Bisa jadi kalian lebih mulia ketika memiliki nilai manfaat yang besar dibandingkan dokter atau profesi apapun," terang Syahrul.

Maka, mau ada dimana kita yang terpenting adalah bisa memberikan kemaslahatan bagi banyak orang. Mau jadi dokter, perawat atau Presiden sekalipun yang penting kebermanfaatan itu yang paling utama. Bisa jadi kalian lebih mulia ketika memiliki nilai manfaat yang besar dibandingkan dokter atau profesi apapun,"

**Dr. H. SYAHRUL AIDI
MAAZAT, Lc., M.A.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Riau II





Terima Aspirasi Nelayan soal Kelangkaan Solar, Aleg PKS: Kami Akan Awasi Proses Distribusinya!

Dalam pertemuan ini, nelayan di Kecamatan Sapekan mengeluhkan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya jenis solar dan pertalite, dan harga BBM di daerah mereka lebih mahal dibanding harga nasional yang ditetapkan Pemerintah.

Jakarta (24/01) – Anggota Komisi VII DPR RI, Diah Nurwitasari, menerima aspirasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kecamatan Sapekan, Sumenep, Madura, melalui platform virtual zoom pada Selasa (24/01).

Dalam pertemuan ini, nelayan di Kecamatan Sapekan mengeluhkan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya jenis solar dan pertalite, dan harga BBM di daerah mereka lebih mahal dibanding harga nasional yang ditetapkan Pemerintah.

Menanggapi keluhan tersebut, Diah menyatakan bahwa ia akan meminta Pertamina untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM ke wilayah Kec. Sapekan.

"Terkait dengan dugaan penyelewengan oleh Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) dan sub-penyalut, kami akan lakukan pengawasan. Jika ada pelanggaran, tentu akan ditindak. Saya di Komisi VII akan berkoordinasi dengan

Pertamina agar harus ada ketegasan apabila terdapat penyelewengan", ujar Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat II tersebut.

Dalam pertemuan yang menghadirkan perwakilan

Pertamina itu, Diah pun menyebut bahwa untuk mengurangi kelangkaan yang terjadi, HNSI akan dilibatkan dalam proses distribusi.

"Pertamina menawarkan untuk bekerja sama dengan organisasi masyarakat, termasuk HNSI, dalam proses penyaluran dan pengawasan dalam distribusi BBM penugasan, seperti Solar dan Pertalite. Hal ini nantinya perlu ditindaklanjuti dengan komunikasi yang lebih intens antara Pertamina dan nelayan", pungkash Diah.

"Terkait dengan dugaan penyelewengan oleh Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) dan sub-penyalut, kami akan lakukan pengawasan. Jika ada pelanggaran, tentu akan ditindak. Saya di Komisi VII akan berkoordinasi dengan Pertamina agar harus ada ketegasan apabila terdapat penyelewengan",

Dipl.Ing. Hj. **DI AH**
NURWITASARI, M. I. POL.
Anggota Komisi VII DPR RI



Kutuk Pembakaran Al-Qur'an di Swedia, HNW Dorong Indonesia Galang Kekuatan OKI Bertindak Tegas

Jakarta (23/01) — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, mengutuk keras aksi pembakaran Kitab Suci Al Quran di Swedia yang dilakukan oleh politisi ekstrimis Rasmus Paludan dengan penjagaan dan legalisasi dari berwenang di Swedia.

HNW sapaan akrabnya menilai, landasan Kemenag dalam menentukan angka kenaikan biaya haji lemah dan membuat resah calon jemaah.

"Memang ibadah Haji hanya diwajibkan bagi yang mampu, dan memang ada kondisi pembiayaan penyelenggaraan Haji yang menyebabkan biaya haji

ditanggung setiap jamaah perlu disesuaikan. Namun penyesuaian tersebut harus berlandaskan perencanaan yang matang, asumsi-asumsi yang riil, dan maksimalisasi lobi dan koordinasi Kemenag dengan pihak Saudi juga dengan BPKH dan Komisi VIII DPR-RI, sehingga pembiayaan Haji tetap mampu dijangkau para calon jemaah Haji. Itulah juga sebagian aspirasi dari calon jemaah haji yang menolak keberatan dengan kenaikan biaya haji yang diusulkan Menag," disampaikan Hidayat dalam keterangannya di Lombok, Sabtu (21/01/2023).

Hidayat juga mendukung sikap keras Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri yang telah terbuka menyatakan penolakan kerasnya, serta berharap agar sikap tegas tersebut juga bisa dibawa ke forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

"Sebagai negara muslim terbesar di dunia, yang demokratis dan menghormati HAM, sudah seharusnya bila Kementerian Luar Negeri RI yang mewakili pemerintah Indonesia tidak berhenti hanya dengan mengutuk aksi pembakaran Al Quran yang merupakan tindakan ekstrim, intoleran, radikal dan bentuk nyata dari Islamophobia yang dapat menciptakan kegaduhan di banyak negara, yang bisa mengganggu hubungan timbal balik Swedia dengan negara-

negara OKI maupun komunitas Umat Islam, karena Al Quran adalah kitab yang disucikan oleh seluruh Umat Islam di seluruh dunia. Pemerintah RI juga perlu lebih serius lagi dengan menggalang sikap kebersamaan di forum OKI, agar gelombang penolakan terhadap tindakan intoleran, ekstrim dan islamophobia tersebut semakin besar dan semakin dapat mengkoreksi dan menghentikan," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Senin (23/01).

HNW sapaan akrabnya mengatakan OKI yang beranggotakan 57 negara tersebut saatnya bersatu untuk mengutuk dan menolak dan menghentikan aksi pembakaran Al Quran oleh ekstrimis garis keras Swedia, Rasmus Paludan, yang seperti ini dibiarkan oleh pemerintah Swedia dengan alasan kebebasan berekspresi. Padahal, bila kebebasan berekspresi itu terkait dengan hak asasi manusia, maka berbagai putusan pengadilan HAM Eropa telah tegas membedakan antara kebebasan berekspresi dan menghina ajaran agama orang lain.

Misalnya, dalam putusan pada 2018 lalu, dimana Pengadilan HAM Eropa di Strassbourg itu menyatakan bahwa penghinaan terhadap

Kutuk Pembakaran Al-Qur'an di Swedia, HNW Dorong Indonesia Galang Kekuatan OKI Bertindak Tegas

« SEBELUMNYA

Nabi Muhammad SAW bukanlah kebebasan berekspresi.

"Dan tindakan Rasmus ini yang jelas-jelas menghina Nabi Muhammad dan ajaran agama Islam, tentunya hal itu jauh dari makna kebebasan berekspresi yang dibenarkan oleh akal sehat maupun Dewan HAM Eropa," tegasnya.

Lebih lanjut, HNW mengatakan selain menggalang kerja sama dengan negara-negara OKI yang sudah menyatakan penolakan dan kutukan keras seperti Turki, Qatar, Malaysia dll, pihak pemerintah Indonesia juga bisa memberikan tindakan yang lebih konkret dengan memanggil Dubes Swedia di Indonesia, agar Umat Islam tidak terprovokasi, agar masalah ini lekas selesai dan tak terulang lagi.

"Apabila pemanggilan Dubes Swedia ini dilakukan segera dan diikuti oleh negara-

negara OKI lainnya, tentu bisa menunjukkan kepada Pemerintah Swedia agar mereka menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara OKI, dan tidak 'bermain-main' dengan hal yang esensial bagi umat Islam, yakni penghormatan terhadap kitab Suci Al-Qur'an," tukas

Anggota DPR RI dari Dapil Jakarta II yang meliputi Luar Negeri ini.

HNW yang juga merupakan Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menambahkan bahwa dasar untuk masyarakat internasional melakukan penggalangan penolakan tindakan pembakaran

alQuran yang merupakan praktek Islamophobia ekstrim, sangat kuat dan relevan.

Pasalnya, pada 15 Maret 2022 lalu, PBB sudah menetapkan hari tersebut sebagai hari internasional untuk menangkal Islamophobia, dimana resolusi itu diterima dan diputuskan pada Sidang Umum PBB.

"Aksi membakar Al Quran ini merupakan wujud nyata dari Islamophobia ekstrim yang harus ditolak dan kita tangkal dan perang! bersama-sama masyarakat Internasional," jelasnya.

"Oleh karenanya, Kemenlu Indonesia perlu bergerak lebih konkret dengan menggalang kekuatan di OKI dan PBB juga lembaga kelslaman internasional lainnya untuk

membela Al Quran dari segala teror dan tindakan yang intoleran, Islamophobia seperti pembakaran Al-Qur'an ini."

Sekaligus menunjukkan perlunya selamatkan prinsip demokrasi agar tidak menjadi democracy karena dirusak oleh ekstrimis intoleran, dan pentingnya menjaga toleransi dan harmoni dengan mengoreksi islamophobia, sebagai bagian pelaksanaan dari resolusi PBB dan pembukaan UUD NRI 1945," pungkasnya.

"Apabila pemanggilan Dubes Swedia ini dilakukan segera dan diikuti oleh negara-negara OKI lainnya, tentu bisa menunjukkan kepada Pemerintah Swedia agar mereka menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara OKI, dan tidak 'bermain-main' dengan hal yang esensial bagi umat Islam, yakni penghormatan terhadap kitab Suci Al-Qur'an,"

**Dr. H.M. HIDAYAT
NUR WAHID, M.A**

Anggota Komisi VIII DPR RI

”





Presiden PKS Lantik Dewan Penasihat, Dipimpin Tifatul Sembiring



Jakarta– Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melantik sejumlah anggota Dewan Penasihat di tingkat pusat, pada Jumat (20/1/2023).

Presiden PKS Ahmad Syaikhul melantik langsung sebanyak 11 anggota Dewan Penasihat PKS. Syaikhul menyebut kehadiran Dewan Penasihat menambah semangat dan soliditas di internal partai.

"Perlu saya ingatkan dalam amanah Munas bahwa PKS menargetkan minimal 15 persen suara pada Pemilu 2024, dan itu perlu kerja keras di berbagai elemen struktur dan kader, kehadiran Dewan Penasihat menambah semangat agar semakin solid struktur di PKS," ucap Syaikhul.

Syaikhul menyebut struktur di PKS akan terbuka mendengar masukan dari Dewan Penasihat, ia juga berharap Dewan Penasihat tidak sungkan memberikan saran agar kinerja pengurus PKS bisa lebih optimal.

"Saya sangat berharap dan

terbuka jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu sekali setelah dilantik bekerja secara optimal dan sampaikan pesan-pesan nasehat dari Bapak Ibu sekali kepada kami di struktur Partai Keadilan Sejahtera apabila ada hal yang dirasa kurang pas atau yang khilaf dari kebijakan kami," tutur Syaikhul.

Lebih jauh Syaikhul

meyakini kehadiran Dewan Penasihat yang memiliki latar belakang yang beragam bisa memberikan saran dan masukan terkait kinerja di struktur partai.

"Saya yakin yang tergabung di dalam dewan penasehat ini para pakar para senior yang yang malang melintang di berbagai bidang dengan kearifan bisa memberikan saran terbaiknya untuk kami yang saat ini di amanahi sebagai pengurus struktur di tingkat pusat selamat bergabung dalam lapangan kita masing-masing," tutup Syaikhul.

"Saya yakin yang tergabung di dalam dewan penasehat ini para pakar para senior yang yang malang melintang di berbagai bidang dengan kearifan bisa memberikan saran terbaiknya untuk kami yang saat ini di amanahi sebagai pengurus struktur di tingkat pusat selamat berjuang dalam lapangan kita masing-masing,"

H. AHMAD SYAIKHU
Presiden PKS



**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website
fraksi.pks.id
-  Instagram
[fraksipksdprri](https://www.instagram.com/fraksipksdprri)
-  Twitter
[@fraksipksdprri](https://twitter.com/fraksipksdprri)
-  Facebook
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/Fraksi_PKS_DPR_RI)
-  Youtube
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/CKSTV_DPR_RI)

***Nantikan
Setiap Pekan***